

**PROGRAM TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH
(TPS) 3R (*REDUCE, RECYCLE, REUSE*) BERBASIS
MASYARAKAT DI DESA KARANGANOM**

**(Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

TIKA REDNA WATI

NIM.145030101111011



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 08 November 2018
Jam : 08:00-09:00
Skripsi atas Nama : Tika Redna Wati
Judul : Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R
(Reduce, Recycle, Reuse) Berbasis Masyarakat di Desa
Karanganom (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mohammad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP., MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 15 Oktober 2018

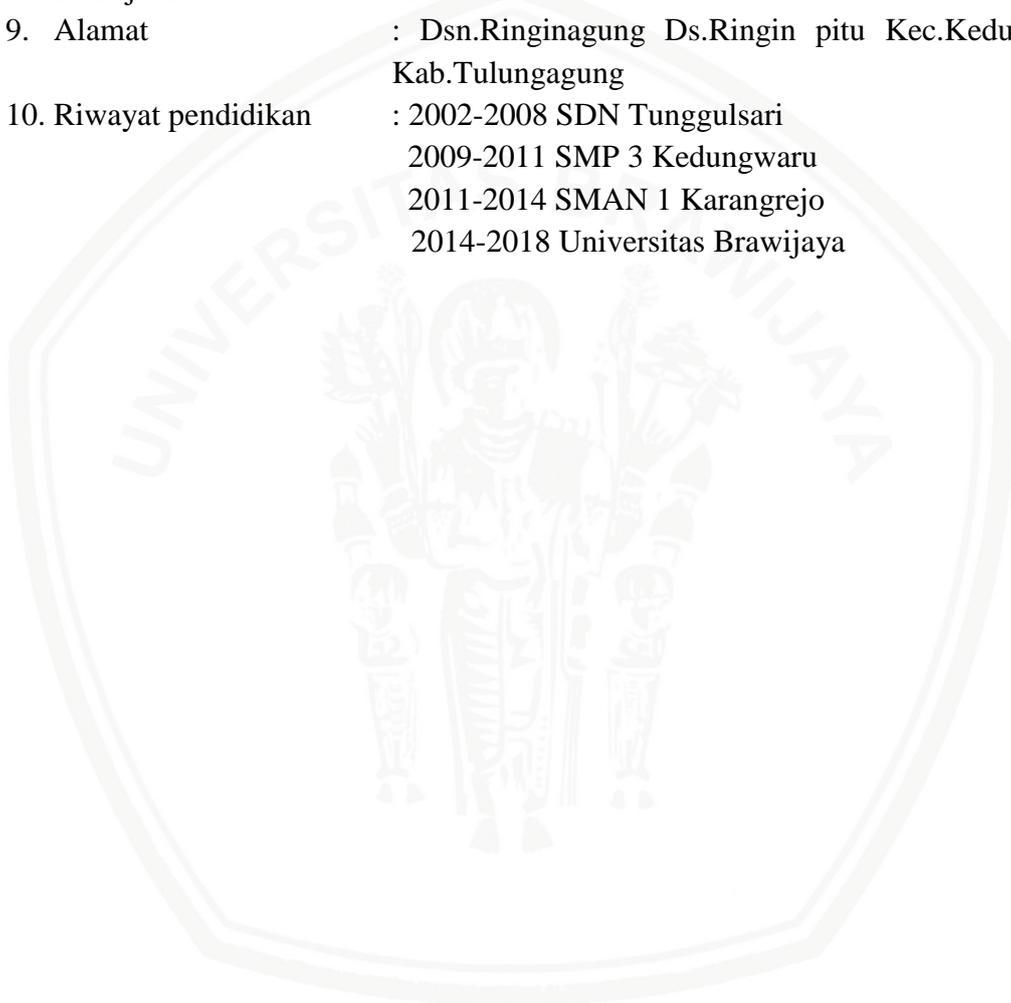


Nama : Tika Redna Wati

NIM : 145030101111011

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Tika Redna Wati
2. NIM : 145030101111011
3. Jurusan : Administrasi Publike
4. E-mail : tikarednaw@gmail.com
5. Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 07 September 1994
6. Agama : Islam
7. Jenis kelamin : Perempuan
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Dsn.Ringinagung Ds.Ringin pitu Kec.Kedungwaru.
Kab.Tulungagung
10. Riwayat pendidikan : 2002-2008 SDN Tunggulsari
2009-2011 SMP 3 Kedungwaru
2011-2014 SMAN 1 Karangrejo
2014-2018 Universitas Brawijaya



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Kota/Kabupaten tergabung program TPS 3R.....	3
2.	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2016.....	56
3.	Wilayah per-Kecamatan serta jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tulungagung	57
4.	Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan dan Cipta Karya 60	
5.	Penggunaan lahan Desa Karangnom	65



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pujisyukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, kurnia, sertahidayah-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Program Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) Berbasis Masyarakat di Desa Karangnom**”.Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. BambangSupriyono, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Mochammad Rozikin, M.AP selaku Komisi Pembimbing yang dengan tulus membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya berupa saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Administrasi Publik yang pernah mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung dan seluruh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta semua pihak yang sudah berkenan memberikan izin, tempat, ilmu dan informasi terkait data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

6. Orang tua tercinta, Bapak Sumitro dan Ibu Sutrimin serta nenek saya terimakasih atas do'a, motivasi, semangat dan didikannya selama ini dengan segenap kasih sayang dan kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih saya ucapkan untuk Rendi yang tidak berhenti memberikan semangat dan menjadi *moodbooster* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku dari SMA, Ningkholidah, Kurniasari, dan Anis sabillul terimakasih atas masuknya maupun do'anya dan menjadi *moodbooster* selama penyusunan skripsi kepada penulis disaat penelitian.
9. Sahabat-sahabat kak Sari uswatunch, kak Ella waqidah, Damay, Della, Tiara, Lutfiafitriana serta anggota kos 51 A yang telah menyemangati dan menemani dalam pengerjaan skripsi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatsaya, Rina, Astin, Ike, Della, Rahma, May, Dewi, Kak Putri, kak Ocha, , terimakasih atas segala bantuan, pengalaman, dan tidak pernah bosan member semangat kepada penulis. Serta bagisemu apihak yang telah membantudan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulissudah untuk memperoleh hasil yang terbaik. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 Oktober 2018

Tika Rednawati

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

Ayahanda Sumitro dan Ibunda Sutrimin,

serta nenek saya Doni dan Saudara-saudara saya serta Sahabat

OSMA dan Teman-teman saya selama di Malang yang

telah menjadi keluarga kedua saya di perantauan.

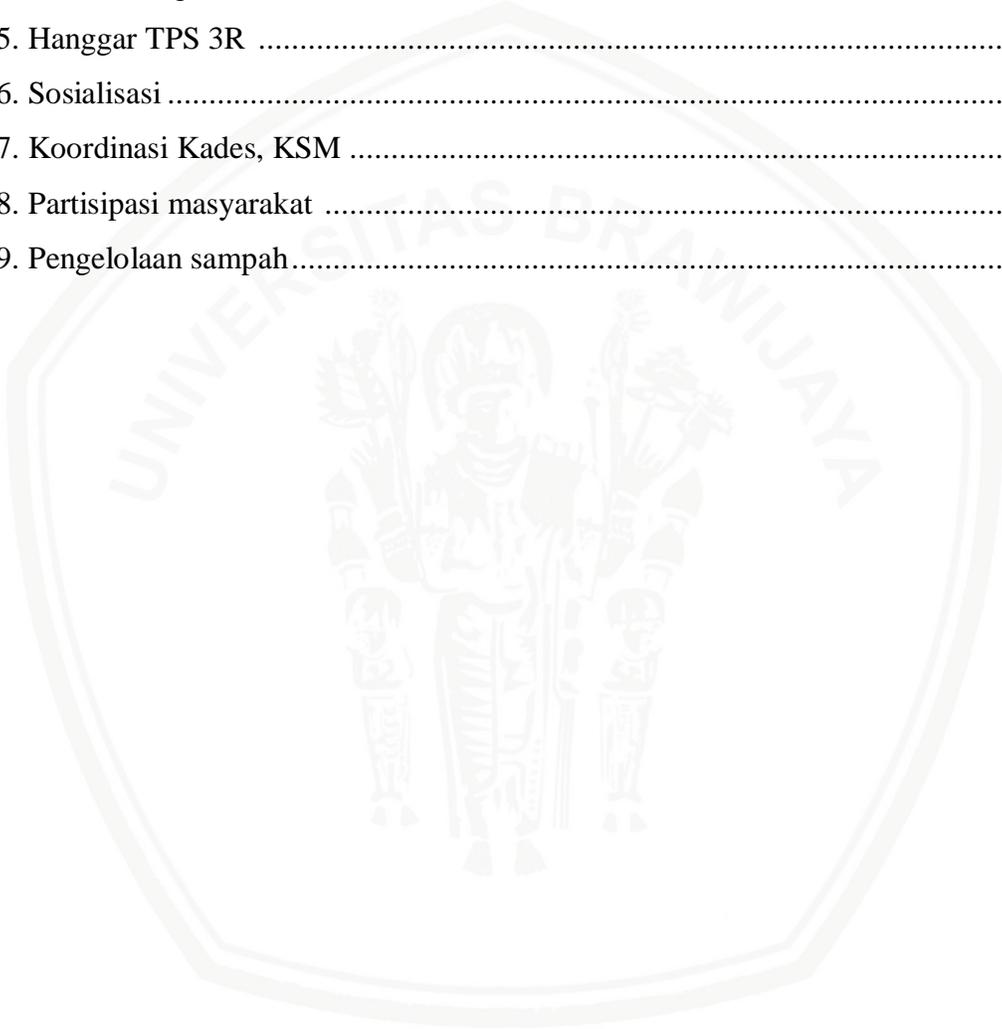
Serta seluruh civitas akademika Universitas Brawijaya,

khususnya almamater Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya... .

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model kesesuaian implementasi program	31
2.	Komponen-komponen analisis data model interaktif	52
3.	Peta Kabupaten Tulungagung.....	55
4.	Struktur Organisasi	60
5.	Hanggar TPS 3R	74
6.	Sosialisasi	78
7.	Koordinasi Kades, KSM	81
8.	Partisipasi masyarakat	85
9.	Pengelolaan sampah.....	92



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Publik	11
1. Pengertian Administrasi Publik.....	11
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik	12
3.Administrasi Pembangunan	14
4.Paradigma Pembangunan.....	15

B. Pembangunan Berkelanjutan.....	16
1. Pengertian Pembangunan Bekelanjutan	16
2. Prinsip Pembangunan Bekelanjutan	18
3. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	19
C.Sampah.....	20
1. Definisi Sampah dan Jenis Sampah.....	20
2. Pengelolaan Sampah	21
3. Aspek Pengelolaan Sampah	22
D.Progam.....	29
1. Definisi Progam.....	29
2. Implementasi Progam	30
3. Kebijakan Publik	33
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Progam	35
E. Partisipasi Masyarakat	37
1. Definisi Partisipasi Masyarakat.....	37
2. Bentuk Partisipasi	39
3.Tingkatan Partisipasi Masyarakat	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	48
G. Analisis Data	50
H. Keabsahan Data.....	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum 53

1. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 53

 a. Sejarah Singkat Kabupaten Tulungagung 53

 b. Visi dan Misi Kabupaten Tulungagung 54

 c. Geografi..... 55

 d. Demografi 56

 e. Pemerintahan 57

2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung 58

 a. Visi dan Misi 58

 b. Tugas Pokok dan Fungsi 59

 c. Struktur Organisasi 60

 d. Kepegawaian 61

 e. Tujuan dan sasaran..... 61

 f. Persampahan 64

3. Profil Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung65

 a. Sejarah..... 65

 b. Kondisi Geografis 66

 c. Jumlah dan Sebaran Penduduk 67

 d. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 67

 e. Upaya Penanganan Persampahan dan Ketersediaan Lahan TPS 3R...68

 f. Sarana dan Prasarana 68

 g. Struktur Pengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 69



B. Penyajian Data

1. Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Desa Karangnom	70
a. Kebijakan yang mengatur program tempat pengelolaan sampah TPS 3R	70
b. Program tempat pengelolaan sampah TPS 3R	73
c. Aktor yang terlibat dalam program tempat pengelolaan sampah TPS 3R	77
d. Anggaran.....	83
e. Partisipasi masyarakat dalam program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	86
2. Faktor yang mendukung dan menghambat program tempat pengelolaan sampah TPS 3R berbasis masyarakat.....	90
a. Faktor yang mendukung program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	90
b. Faktor yang menghambat program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	94

C. Analisis Data

1. Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Desa Karangnom	96
a. Kebijakan yang mengatur program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	95
b. Program tempat pengelolaan sampah TPS 3R	100
c. Aktor yang terlibat dalam program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	103

d. Anggaran.....	108
e. Partisipasi masyarakat dalam program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	111
2. Faktor yang mendukung dan menghambat program tempat pengelolaan sampah TPS 3R berbasis masyarakat di Desa Karangnom	113
a. Faktor yang mendukung program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	113
b. Faktor yang menghambat program tempat pengelolaan sampah TPS 3R.....	116
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124



ABSTRAK**Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) Berbasis Masyarakat di Desa Karanganom**

Oleh

Tika Redna W.

Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan sampah yang sering terjadi di setiap kota yang ada di Indonesia. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan menjalankan program pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis. Pertama Bagaimana kebijakan program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) berbasis masyarakat di Desa Karanganom oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung dan yang kedua untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R di Desa Karanganom. Koordinasi dan rebug desa terhadap pembentukan/pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga organisasi dilakukan dengan pembentukan tim Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).



ABSTRAK

Community Based Waste Management Program (TPS) Program (Reduce, Recycle, Reuse) in Karanganom Village

Oleh

Tika Redna W.

Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

This research is based on garbage problems that often occur in every city in Indonesia. One effort to overcome this problem is to run a waste management program. This study aims to find out, describe and analyze. First What is the policy of the community based waste management program (TPS) 3R (Reduce, Recycle, Reuse) in Karanganom Village by the Public Works Agency of Highways and Cipta Karya of Tulungagung Regency and the second to find out what are the supporting and inhibiting factors in running a place program 3R waste management (TPS) in Karanganom Village. Coordination and village consultation on the establishment / construction of a 3R Waste Management Site (TPS) carried out by the organization's Bina Marga Public Works Agency was carried out by establishing a team of Community Self-Help Groups (KSM).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

a. Sejarah Singkat Kabupaten Tulungagung

Pada tahun 1205M atau tahun 1127 caka masyarakat thani lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari raja Daha terakhir, Kertajaya atas kesetiaan mereka kepada raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam prasasti lawadan dengan candra sengkala “Sukra suklapaksa manga siramasa” yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung. Nama Tulungagung sendiri dalam bahasa sanksekerta berasal dari kata tulung (pertolongan) dan agung (besar) selain itu ada pula yang menafsirkan kata tulung itu berarti mata air dan agung berarti besar. Cerita mengenai Kabupaten Tulungagung sangat lekat dengan asal-usul sejarah peradapan manusia. Tepatnya di desa Wajak bagian selatan Tulungagung pada tahun 1889 telah diketemukan kerangka manusia purba yang lebih dikenal dengan manusia wajak (*homo wajakensis*) menurut para ahli arkeologi jenis manusia ini digolongkan ke dalam jenis manusia ini di golongankan ke dalam jenis manusia cerdas (*homo sapiens*).

b. Visi Kabupaten Tulungagung

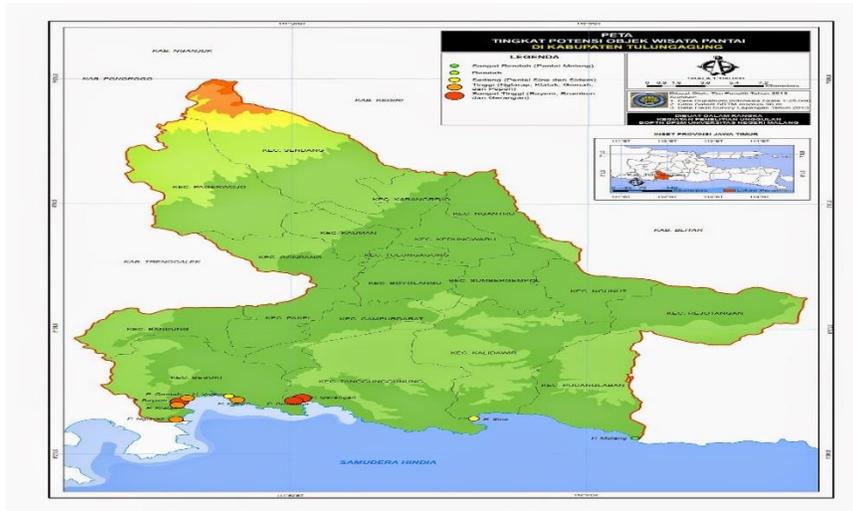
“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan melalui pembangunan dihatiku ingandaya”

Misi Kabupaten Tulungagung

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis dihatiku ingandaya dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia
3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa guna menjamin pencapaian masyarakat maju dan mandiri yang berkeadilan social.
5. Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis yang didukung oleh terpeliharanya ketertiban, ketentraman di masyarakat serta tegaknya supermasi hukum.



c. Geografi



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tulungagung

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2016

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111^o43' sampai dengan 112^o07' bujur timur dan 7^o51' sampai dengan 8^o18' lintang selatan. Batas daerah disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 km² habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Kediri

Sebelah timur : Kabupaten Blitar

Sebelah selatan : Kabupaten Hindia/Indonesia

Sebelah Kauman : Kabupaten Trenggalek

Luas administrasi total Kabupaten ialah 1.055,65 km² atau 105.565 ha dimana wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung tersebut terdiri atas 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

d. Demografi

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No.	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-14	119.401	114.674	234.075
2.	15-64	335.500	358.150	693.050
3.	65+	45.290	53.086	98.376
	Jumlah	500.191	525.910	1.026.101

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulungagung 2016

Dari data diatas Kelompok Umur Laki-laki Perempuan usia 0-14 berjumlah 234.075 jiwa, kemudian usia 15-64 berjumlah 693.050 jiwa dan yang usia 65+ berjumlah 98.376 jiwa. Jadi Jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Tulungagung ialah 1.026.101 jiwa. Data penduduk sangat penting sebagai salah satu data pokok, karena kependudukan merupakan obyek dan sekaligus subyek dalam pembangunan.

e. **Kepemerintahan**

i. Jumlah Kecamatan/ Kelurahan/ Desa

Tabel 4.2
Wilayah per-Kecamatan serta jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten
Tulungagung

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Besuki	10
2.	Bandung	18
3.	Pakel	19
4.	Campurdarat	9
5.	Tanggunggunung	7
6.	Kalidawir	17
7.	Pucanglaban	9
8.	Rejotangan	16
9.	Ngunut	18
10.	Sumbergempol	17
11.	Boyolangu	17
12.	Tulungagung	14
13.	Kedungwaru	19
14.	Ngantru	13
15.	Karangrejo	13

16.	Kauman	13
17.	Gondang	20
18.	Pagerwojo	11
19.	Sendang	11
	Total	271

Luas administrasi total Kabupaten adalah 1.055,65 km² atau 105.565 ha dimana wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung tersebut terdiri atas 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung

a. Visi

Visi dimaksud adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana arah yang dituju. Dengan penentuan visi yang tepat akan memberikan arah dan fokus yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan

”Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum melalui pemerataan pembangunan yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung aktifitas pembangunan sektor lain”

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung mempunyai misi berikut:

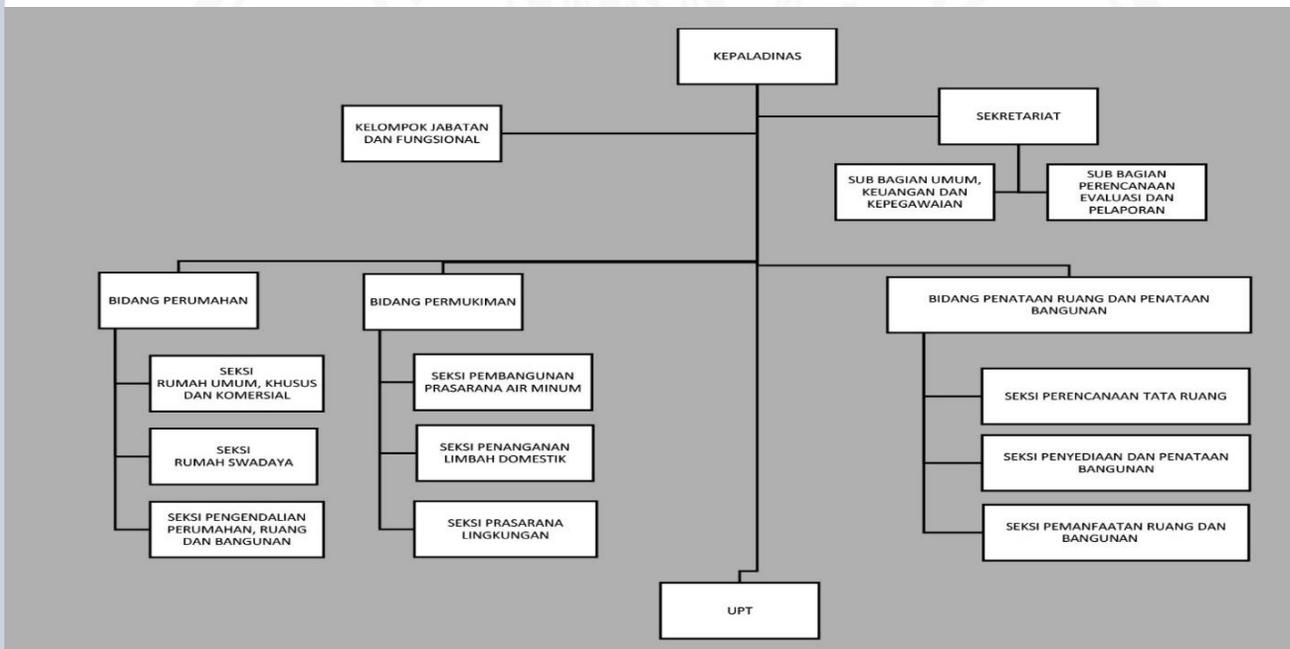
1. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kebinamargaan guna kelancaran transportasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perumahan melalui pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur keciptakaryaannya melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak, bersih, sehat dan teratur.
4. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan tata bangunan dalam pengendaliannya yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan pengelolaan kebersihan dan penataan ruang terbuka hijau melalui taman perkotaan serta fasilitas pelayanan penerangan jalan umum (PJU) yang hemat energy.

b. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan Dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum diantaranya adalah perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan Dan Cipta Karya, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan dan Cipta Karya.
2. Pemberian rekomendasi teknis dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan dan Cipta Karya.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan Dan Cipta Karya.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

c. Struktur organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasai

Sumber: Jdih.Tulungagung.go.id

d. Kepegawaian

Kondisi sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek kebutuhan organisasi yang telah memadai, namun jika dilihat dari aspek fungsi masih terdapat kebutuhan khususnya yang bersifat teknis operasional dalam jabatan maupun tugas staf teknis. Keadaan jumlah pegawai serta status pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Perumahan dan Cipta Karya
Kabupaten Tulungagung

NO.	URAIAN	PNS	HONORER	JUMLAH
1	SD	91	70	161
2	SLTP	63	85	148
3	SLTA	158	70	228
4	D 3	5	2	7
5	S 1	47	6	53
6	S 2	10	-	10
	Total	374	233	607

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Perumahan dan Cipta Karya, 2015

e. Tujuan

1. Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dalam kondisi baik jalan dengan indikator :
 - a. Prosentase panjang jalan kondisi laik jalan.

Sasaran

1. Meningkatnya insfrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi yang layak guna mendukung kelancaran transportasi dengan indikator :
 - a. Jumlah panjang jalan kondisi laik jalan.
 - b. Jumlah jembatan yang layak.
2. Meningkatnya kebutuhan rumah layak hini yang sehat melalui perbaikan rumah tidak layak huni sesuai standar teknis bangunan dengan indikator :
 - a. Bertambahnya rumah layak huni pada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Meningkatnya kawasan lingkungan permukiman yang layak, bersih dan sehat melalui penyediaan air minum, sanitasi dan penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan indikator :
 - a. Jumlah cakupan rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan.
 - b. Jumlah rumah yang memiliki sanitasi.
 - c. Jumlah berkurangnya area kawasan permukiman kumuh perkotaan.
4. Tersedianya penataa ruang dan bangunan permanen yang berstandar teknis dan berwawasan lingkungan dengan indikator :
 - a. Jumlah luasan wilayah yang sesuai RDTR.
 - b. Jumlah bangunan permanen yang berstandar teknis.
5. Mewujudkan pengelolaan kebersihan dan penataan RTH untuk taman perkotaan serta fasilitas PJU yang henat energi dengan indikator :
 - a. Jumlah pengangkutan sampah untuk pengurangan sampah.

- b. Jumlah taman dengan kondisi baik.
- c. Jumlah fasilitas PJU pada jalan kota.

f. Persampahan

Kabupaten Tulungagung untuk persampahan ada 3 misi yang pertama yaitu yaitu “meminimalisir timbulan sampah pada tahun 2021” dengan maksud bahwa meminimalisir ialah dengan mengurangi jumlah timbulan sampah, timbulan sampah bisa berkurang dengan cara melakukan pola 3R di masyarakat. Pola 3R ialah melakukan pemanfaatan kembali sampah yang masih di pakai, mengurangi penggunaan bahan yang dapat menjadi sampah dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang memiliki ekonomis. Dengan pola 3R maka masyarakat dapat menghemat pengeluaran dan menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, kemudian misi kedua ialah “meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah pada tahun 2021” yang berarti bahwa visi sanitasi akan dapat tercapai dengan peningkatan cakupan layanan dan peran masyarakat untuk mendukung pengelolaan persampahan. Dan untuk misi ketiga yaitu “mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi kegunaan TPA sebagai tempat pemrosesan sampah yang layak, sebagai media edukatif dan tempat pariwisata” misi ini memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah di TPA akan memiliki unsur Pendidikan bagi anak bangsa penerus generasi di Kabupaten Tulungagung akan ditanamkan pengetahuan untuk pengelolaan sampah di TPA dengan mengoptimalkan peran fungsi TPA sebagai media pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat.

3. Profil Desa Karangnom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

a. Sejarah

Sejarah dan saksi hidup dari warga Desa Karang Anom pada awalnya Desa Karang Anom adalah merupakan wilayah dalam Desa Bungkok Kecamatan Jabung yang menjadi areal peladangan yang pada waktu itu Desa Sumberrejo dipimpin oleh Kepala Desa bernama Abdul Manaf Karna banyaknya Pendatang di sebrang sungai batang hari yang kemudian diberi nama desa Kates maka pada tahun 1977 dibentuklah salah satu pemerintahan yang disebut Desa. Pada awalnya terdiri dari tiga Desa yaitu Desa kates, Desa mojosari dan Desa bolorejo dan tahun 1981 bertambah satu desa lagi yaitu desa Karangnom. Kemudian pada bulan Nopember 1988, terjadi huru hara yang mengakibatkan kepala Desa Abdul Manaf harus meninggalkan Desa Sumber Jaya , yang kemudian masyarakat melanjutkan Kepemerintahan Menjadi Desa Karangnom yang Pemerintahannya menginduk pada Desa mojosari, dan Desa Karangnom Bersetatus Dusun. Yang pada akhirnya pada tanggal 03 April 2005 Dusun Karang Anom yang terbagi lagi menjadi 4 Dusun, yaitu Dusun Karang Anom I, Karang Anom II, Karag Rejo, dan Dusun Jaga Baya, dan terdiri dari 14 Ketua Rukun Tangga, maka terbentuklah Desa Karangnom desa persiapan memisahkan dari Desa Sumberrejo.

b. Kondisi Geografis

Desa Karanganom terletak pada posisi bagian kauman dan 8 km dari ibukota kabupaten Tulungagung, berdasarkan hasil survey GPS, titik koordinat Desa Karanganom berada pada 8.0365 lintang selatan dan 111^o85'1265 bujur timur. Luas wilayah desa Karanganom ialah 361,93 ha/m², jarak pelayanan desa Karanganom dengan kantor kecamatan sejauh 4km, sedangkan jarak dengan pusat pelayanan pemerintah kabupatrn Tulungagung sejauh 8km.

Adapun batas-batas administrasi secara geografis Desa Karanganom dapat di ketahui dari:

1. Sebelah Utara :Desa Kates
2. Sebelah Selatan : Desa Bolorejo
3. Sebelah Timur : Desa Mojosari
4. Sebelah Barat : Desa Pucangan

Sebagian besar penduduk desa Karanganom bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian, hal ini dapat dilihat dari profil desa atau peta desa. Lahan untuk pertanian seluas 182 Ha dan sawah untuk ½ seluas 14 Ha. Sedangkan ladang penduduk seluas 16Ha dan hutan produksi seluas 28 Ha. Adapun penggunaan lahan dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 4.2
Penggunaan Lahan Desa Karanganom

Penggunaan Lahan	Luas (Ha/m ²)
Permukiman	12

Persawahan teknis	182
Persawahan ½ teknis	14
Ladang	16
Tanah perkebunan rakyat	12
Pekarangan	6
Hutan produksi	28
Fasilitas umum lainnya	31,48
Jumlah	192,73

Sumber: Buku Pedoman TPS 3R tahun 2017

c. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan buku profil desa pada tahun 2016 di desa Karanganom terbagi terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Srabah dan Dusun Gender. Desa Karanganom terdiri dari 5 RW dan 15 RT. Jumlah penduduk desa Karanganom sebanyak 3.856 jiwa yang terbagi dalam 1.908 penduduk laki-laki dan 1.948 penduduk perempuan dan tergabung dalam 1.265 KK.

d. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Potensi desa Karanganom merupakan daerah dimana masyarakat sebagian besar Bertani. Pertanian yang ada diantaranya sawah meliputi sebagian tanaman sayur, palawija dll, sedangkan peternakan yang tampak adalah peternakan sapi, ayam kampung dan kambing. Selain itu masyarakat ada yang berdagang mracang, membuka warung makanan, warung kopi, masyarakat juga ada yang menggali potensi sumber

alamnya sebagai mata pencahariannya misalnya memecah batu kali untuk dipecah menjadi batu cor/krecek yang diambil dari sungai disekitarnya.

e. Upaya Penanganan Persampahan dan Ketersediaan lahan TPS 3R

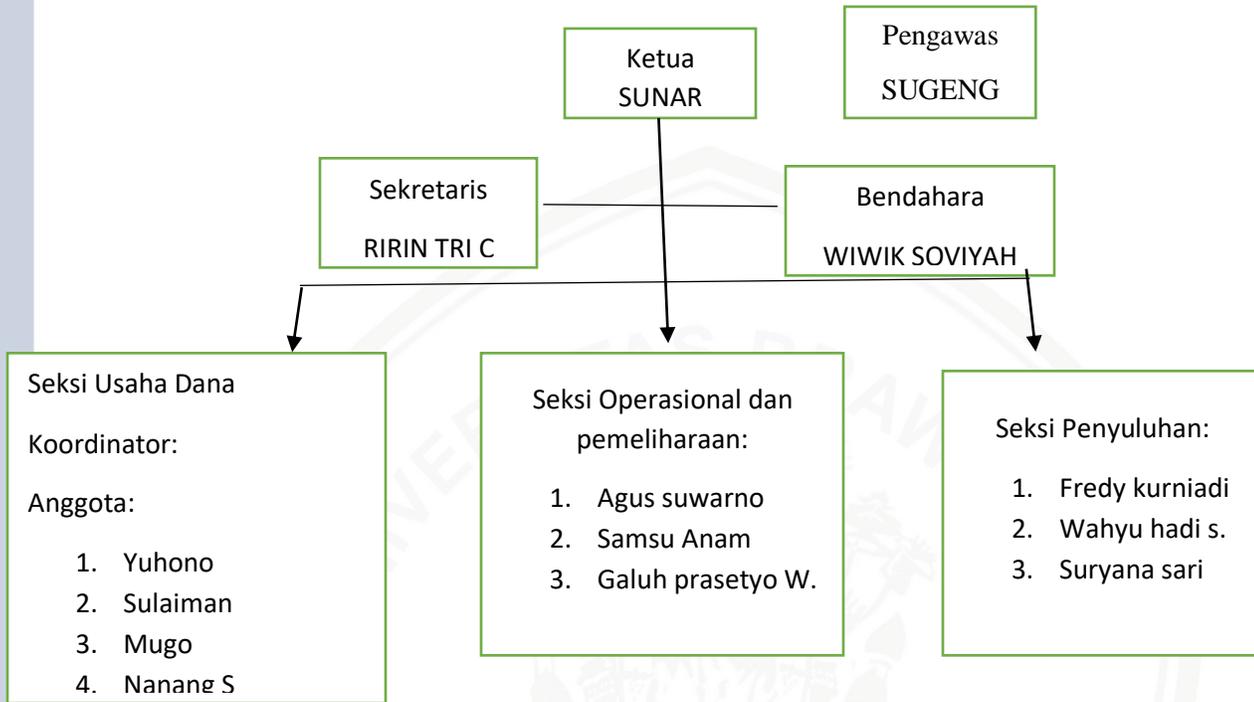
Guna mendukung kegiatan pembangunan TPS 3R yang di programkan oleh Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PS-PLP) Provinsi Jawa Timur, maka pihak desa Karangnom menyiapkan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembangunan TPS 3R.lahan tersebut merupakan tanah kas desa, agar terwujudnya pelaksanaan program TPS 3R pihak pemerintah desa akan memberikan tanah kas desa sesuai kebutuhan pembangunan tempat pengolahan sampah.

c. Sarana dan Prasana

Berikut adalah beberapa sarana dan prasarana yang terdapat di tempat pengelolaan sampah 3R di Kelurahan Karangnom:

- Viar/dump truck
- Mesin Pencacah sampah, alat menghancurkan sampah organic berukuran kecil untuk dibuat pupuk.
- Keranjang Sampah
- Bak Pengomposan
- Sekop, cangkul ,garuk, sapu lidi,selang air
- Gerobak sampah, alat untuk mengangkut sampah dengan jarak dekat.

d. Struktur Pengelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)



B. Penyajian Data Dan Fokus Penelitian

1. Bagaimana Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce,Recycle,Reuse*) Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karanganom:

a. Kebijakan yang mengatur program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce,Recycle,Reuse*)

Sampah merupakan meterial sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, sampah menyebabkan persoalan yang cukup serius tidak pandang wilayah kota besar maupun kota kecil jika tidak tertangani dengan baik maka sampah menjadikan permasalahan. Masalah kebersihan terkait dengan permasalahan penanganan sampah. Sampah di Desa Karanganom berasal dari berbagai sumber diantaranya dari limbah rumah tangga, sekolahan dan yang disekitarnya. Semua sampah dari sumber masing-masing ada yang bermuara ke TPA dan ada juga yang membuang sampah di sungai, kemudian ada juga yang di bakar atau di timbun dilahan kosong dan tidak ditangani dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus bertambah dan tidak ditertangani dengan baik, Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung telah mengikuti program yang dibentuk oleh Kementrian Provinsi Jawa Timur. Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, selain itu juga berdasarkan Permen PU Nomor 3 tahun 2013 yaitu

tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggungjawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Program tersebut disosialisasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, kemudian program tersebut turun ke dinas yang ada di Kabupaten-Kabupaten termasuk Kabupaten Tulungagung yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dan disosialisasikan ke Kecamatan Kauman untuk disampaikan ke beberapa desa yang ada di Kecamatan tersebut kemudian dengan adanya pernyataan tersebut Desa Karangnom mengajukan proposal adanya peraturan serta terbentuknya program tersebut.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, selain itu juga berdasarkan Permen PU Nomor 3 tahun 2013 yaitu tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggungjawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung merupakan peran dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung dalam proses

terjalinnnya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah , tidak hanya memberi bantuan sarana dan prasana namun peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No.58 Tahun 2014 melalui bidang cipta karya yang membawahi seksi penyehatan lingkungan yang intinya ialah membantu pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan pelayanan kebersihan, permukiman, tata bangunan dan tata ruang. Berikut wawancara dengan bapak Ari selaku kasi bidang cipta karya:

“iya jadi ada urutanya dan prosesnya juga lumayan panjang mbak, mulai dari musrenbang antara Dinas PU dengan kepala desa ,RT/RW ,tokoh masyarakat, aspirasi dari setiap perwakilan masyarakat yang telah didiskusikan di setiap tingkatan, baik kelurahan maupun tingkat kota akan diambil sebagian yang merupakan prioritas dari tingkat musrenbang, musrenbang tingkat kota sebelum akhirnya diketok palu untuk penerapan program tersebut.” (wawancara pada tanggal 7 April 2018 pukul 10.00 WIB di kantor dinas PU)

Hal tersebut juga dikemukakan oleh ibu Wiwik selaku bendahara KSM:

“jadi dalam musrenbang yang telah dilakukan di tingkat kelurahan akan di bawa ke tingkat kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung usulan-usulan aspirasi dari kelurahan dan tokoh masyarakat ” (wawancara pada tanggal 7 April 2018 pukul 13.00 WIB di kantor TPS)

Pernyataan tersebut di perkuat oleh bapak Toto selaku warga Kelurahan

Karanganom:

“usulan maupun aspirasi dari tingkat Kelurahan selanjutnya di bawa ke tingkat Kecamatan untuk di musyawarahkan lagi kemudian jika memang didalam usulan tersebut terdapat kesesuaian program di masing-masing kelurahan maka tahap selanjutnya akan di buat

perencanaan program”(wawancara pada tanggal 8 April pukul 12.45 WIB di kantor TPS)

Berkenaan dengan hal tersebut bapak Ari menambahkan pernyataan yaitu:

“dalam pelaksanaan program harus melalui musyawarah terlebih dahulu dan harus ada kerjasama yang baik antara semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan sampah (wawancara 7 April 2018 pukul 09.00 WIB di kantor Dinas PU)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa musrenbang dilakukan secara bertahap untuk dapat menampung aspirasi dari setiap perwakilan masyarakat pada setiap tingkatan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dari masing-masing usulan pengelolaan sampah dari masyarakat. Dapat diketahui dalam pelaksanaan program harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam musrenbang bertujuan untuk menampung usulan pengelolaan sampah dari masyarakat demi terwujudnya dan keselarasan dalam mencapai tujuan.

b. Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R

Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R ialah tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* (mengurangi, menggunakan, daur ulang) pendekatan pengelolaan 3R mulai dari menjemput sampah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik akan dijadikan kompos. Konsep utama pengelolaan sampah pada TPS 3R, adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPS 3R tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu produk, tidak berperan sebagai

pabrik (misalnya, sebagai pabrik kompos, pabrik gas bio, atau pabrik sampah terdaur ulang), melainkan berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, untuk meletakkan TPA sampah pada hirarki terbawah, sehingga meminimasi residu saja untuk diurug dalam TPA sampah. Penyelenggaraan TPS 3R harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan melalui:

1. Proses pelibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
2. Proses pemberdayaan/penguatan masyarakat dan Pemerintah Daerah
3. Proses pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan TPS 3R

Dalam sistem perkotaan, maka TPS 3R berperan sebagai infrastruktur dalam penanganan sampah. Jumlah, kapasitas, dan keberfungsian harus dipastikan, karena merupakan upaya untuk mengurangi kuantitas dan/atau karakteristik sampah yang masih harus diproses lebih lanjut pada TPA sampah, dimana pengurangan sampah dilakukan dari sumber sampah. Dalam rangka memudahkan berbagai pihak dalam melaksanakan program pengurangan sampah tersebut, disusunlah suatu Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R)

Tujuan program ini pemerintah memberikan sarana kepada masyarakat dikawasan permukiman padat diperkotaan yang ingin melaksanakan

pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sesuai dengan pilihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka. Lahan yang dibutuhkan minimal 200 m² dan tingkat pelayanan minimal 200 KK. Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh bapak Ari selaku kasi bidang cipta karya:

“TPS 3R merupakan program nasional dari Kementerian PU ada respon terkait pembangunan sanitasi khususnya untuk persampahan, selain permasalahan sampah yang ada mana yang benar-benar butuh dan mau mengubah perilaku, kenapa karanganom karena harus ada kesiapan lahan minimal 200 m² ini harus klir dulu diawal, tujuan dari pembangunan ini agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan budaya hidup bersih tidak membuang sampah sembarangan.” (wawancara tanggal 6 April 2018 pukul 10.25 WIB di kantor Dinas Cipta Karya Bina Marga Kabupaten Tulungagung)



Gambar : 4.3 Hanggar TPS 3R

Sumber: dokumentasi KSM Desa Karangnom tahun 2017

Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat merupakan salah satu penyelenggaraan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan metode pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah maupun tinggi, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada masyarakat yang ada di pemukiman tersebut. Masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam proses pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana TPS 3R terbangun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Ari selaku kasi bidang cipta karya:

“Dengan adanya program TPS 3R serta pemanfaatan sarana dan prasarana ini bisa mengurangi dampak lingkungan. Sampah berceceran dimana akhirnya pihak pemerintah daerah biar sedikit terbebas dari sampah menuju program kotaku, salah satunya mengikuti program TPS 3R.” (wawancara tanggal 6 April 2018 pukul 10.25 WIB di kantor Dinas Cipta Karya Bina Marga Kabupaten Tulungagung)

Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R merupakan salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah yang ada di masyarakat berawal ketika sampah di sekitar masyarakat tidak ditangani dengan baik. Untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih sehat dan indah perlu adanya pengelolaan sampah yang baik, selain itu pengelolaan sampah ini juga di harapkan dapat menaikkan nilai sampah dari barang tak berguna menjadi barang yang bermanfaat. Pengelolaan sampah dapat juga berguna untuk memperbaiki kondisi sumber daya alam yang biasanya dapat mengalami kerusakan karena

banyaknya sampah atau untuk menghemat sumber daya alam apabila sampah yang ada di daur ulang.

c. Aktor yang terlibat dalam program tempat pengelolaan sampah

Pelaksanaan program tempat pengelolaan sampah dilaksanakan secara terkoordinir yang melibatkan pemerintah, seluruh lapisan masyarakat, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Seperti yang diungkapkan oleh ibu Ririn selaku sekretaris KSM:

“Terdapat beberapa institusi maupun aktor yang berwenang dalam pengelolaan sampah yaitu pemerintah, masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2012 petunjuk peraturan daerah di kabupaten Tulungagung, peran pemerintah diatur dalam bab III pasal 3 dan peran serta masyarakat diatur dalam bab IV pasal 10” (wawancara tanggal 16 April 2018 pukul 11.05 WIB di kantor TPS)

Pernyataan tersebut di dukung oleh bapak Ari selaku kasi bidang cipta karya:

“iya mbak, jadi mulai dari pembentukan program sampai program di ketok palu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, disini pemerintah Penyaluran dana APBN dilakukan melalui Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi” (wawancara tanggal 7 April 2018 pukul 13.10 WIB di kantor PUPR)

Dari pernyataan diatas bahwasanya setiap pelaku pelaksanaan pengelolaan sampah mempunyai tugas dan fungsinya sesuai peran masing-masing *stakeholders*. Secara normatif lembaga atau instansi merupakan penggerak seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan persampahan dari sumber sampah sampai TPA, dalam hal ini dinas berfungsi sebagai

regulator sekaligus menjadi fasilitator. Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah sebagai penyelenggaraan maupun pembuat program/kebijakan dalam penyelenggaraan agar pemanfaatannya bisa optimal serta mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah yang harus diambil pemerintah yaitu memulai dengan cara memberikan pengertian kepada masyarakat dalam aspek teknis pengelolaan sampah yang baik dan benar agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Selain memberikan pengertian pemerintah juga menyediakan fasilitas penunjang terselenggarakannya pengelolaan sampah yang baik dan menyeluruh, selanjutnya sebelum merumuskan kebijakan lebih sering memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pemberian saran. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam mengadakan pengarahan dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah agar terciptanya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan yang diancam oleh keberadaan sampah. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibu Ririn selaku sekretaris KSM:

“Disini pemerintah sebagai pembuat program sekaligus dalam bentuk pembiayaan dan fasilitas pembangunan gedung ini, setelah itu pemerintah juga melakukan sosialisasi ke masyarakat”. (wawancara tanggal 16 April 2018 pukul 11.20 WIB dikantor KSM)



Gambar 4.4 Sosialisai

Sumber: dokumentasi KSM Desa Karangnom tahun 2017

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan bapak Ari selaku kasi bidang cipta karya bahwapengelolaan dari pemerintah lebih banyak menyediakan sarana prasana secara fisik:

“Pemerintah memberi fasilitas sarana dan prasarana, pengelolaan dari pemerintah lebih banyak dengan menyediakan gerobak sampah dan viar pengangkut sampah, dan warga di bantu oleh kelompok swadaya masyarakat yang mengelola TPS 3R tersebut, dengan adanya tempat pengelolaan sampah ini memberikan keuntungan warga agar dapat menjaga lingkungan dan bersih dari sampah”. ”(wawancara tanggal 22 April 2018 pukul 11.05 WIB dikantor KSM)

Pelaksanaan pengelolaan sampah dari pemerintah yang dominan dalam proses pengelolaan yaitu pemerintah menyediakan fasilitas fisik sarana dan modal dalam bentuk fisik dan sosialisasi kepada warga kelurahan Karangnom. Kemudian warga di bantu oleh kelompok swadaya masyarakat mengelola tempat pengelolaan sampah

(TPS) 3R pengelolaan tersebut memberikan manfaat menyelaraskan, masyarakat dapat memperoleh kenyamanan kebersihan dan pemerintah merasakan lingkungan yang da pada wilayahnya menjadi lingkungan yang nyaman untuk di huni dengan sampah yang dikelola dengan baik dan benar.

Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut manajemen yang tepat dalam melaksanakannya. Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan dalam pengelolaan persampahan untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif. Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R berbasis masyarakat yang diarahkan kepada daur ulang sampah hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Karena dengan adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas dan lain-lain, oleh karena itu perlu suatu perubahan paradigma yang lebih mengedepankan proses pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yakni dengan melakukan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah sebelum akhirnya dibuang.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah agar menjaga kebersihan lingkungan sehingga aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah baik secara umum maupun dalam kegiatan 3R dan pendapat dalam upaya peningkatan

pengelolaan sampah. Tugas masyarakat membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan oleh pemerintah setiap rumah, memisahkan sampah organik atau anorganik serta tidak lagi membuang sampah sembarang. Hal ini seperti yang diungkapkan bapak Toto selaku warga kelurahan karanganom:

“iya mbak saya bersama masyarakat yang lain hanya ditugaskan membuang sampah yang tlah disediakan oleh ksm dan tidak boleh membakar sampah dan membuang disungai”. (wawancara tanggal 21 April 2018 pukul 10.00 WIB di gardu)

Hal ini juga di dukung pernyataan dari bapak Toto selaku warga Kelurahan Karanganom:

“iya mbak setiap rumah di kasih tempat sampah dari KSM trus seminggu dua kali gitu di ambil sampahnya sama pekerja pengambil sampah”.(wawancara tanggal 21 April 2018 pukul 10.30 WIB di gardu)

Namun dalam kenyataanya masih ada kendala tidak berjalan sesuai keinginan, sebagai contohnya saja masih terdapat masyarakat yang kurang antusias terhadap program tersebut diantaranya masalah pembayaran retribusi setiap bulannya dan warga masih ada yang membakar sampah maupun membuang sampah disungai. Hal ini sesuai yang di sampaikan oleh ibu Wiwik selaku bendahara KSM:

“iya mbk beberapa dari warga masih ada yang membakar sampah, slain itu memang ada kendala dalam pembayaran iuran tiap bulanya, soalnya ada yang setuju sesuia penetapan dari pemerintah setaip bulanya Rp.10.000 dan ada pula yang bilang kemahalan dan cuma bayar Rp.7.000, jadi masih terdapat pro dan kontra.”(wawancara tanggal 18 April 2018 pukul 10.00 WIB di kantor KSM)

Hal ini didukung dengan pendapat ibu Ririn selaku sekretaris KSM:

”Iya..ada juga warga yang ngurepne bak sampah mbak, gak mau ikut program ini, trus ada yang membakar sampah, ada juga yang kalo pas waktu bayar nawar kadang bilang besok aja pak.”(wawancara tanggal 18 April 2018 pukul 10.30 WIB di kantor KSM)

Dari pernyataan diatas bahwa program ini tidak selalu berjalan lancar, pasti ada kekurangan dalam pelaksanaannya seperti halnya pola pikir masyarakat ada yang mendukung dan ada pula yang kontra. Motivasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam berjalanya suatu program, dimana melalui motivasi maka masyarakat atau target dari inovasi dapat lebih terarah dan sesuai hasil yang dicapai. Motivasi membawa peranan yang penting guna meningkatkan kemauan maupun kemampuan.



Gambar 4.5 Koordinasi Kades, KSM

Sumber: dokumentasi KSM Desa Karangnom tahun 2017

Kelompok swadaya masyarakat sebagai bentuk dukungan dan bantuan kepada masyarakat terhadap program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat yang nantinya melakukan proses pelaksanaan konstruksi bangunan TPS 3R, serta pemangku kewenangan dalam menjalankan keberhasilan pengelolaan

sampah yang di programkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PS-PLP). Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan oleh bapak Ari selaku Ari selaku kasi bidang cipta karya:

”jadi disini dalam pengelolaan sampah dan berjalannya program TPS 3R ini dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berkecimpung langsung dengan masyarakat untuk membantu dan juga mengarahkan masyarakat.”(Hasil wawancara tanggal 6 April 2018 pukul 10.30 WIB)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bu Yuniati selaku kepala desa Karanganom:

“pengelolaan pada TPS 3R tersebut dilakukan oleh KSM yang dibantu oleh iuran kebersihan pada warga, iuran tersebut nantinya juga digunakan untuk upah kebersihan pada petugas yang bekerja. Dampaknya bagus meskipun ada beberapa warga yang enggan untuk membayar iuran, kedepannya warga juga diharapkan untuk membayar iuran tepat waktu, tujuannya agar petugas yang bekerja kesejahteraanya dapat terjamin”..(wawancara tanggal April 2018 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Cipta Karya melibatkan kelompok masyarakat tertentu yaitu kelompok swadaya masyarakat. Adanya pembentukan kelompok swadaya masyarakat merupakan suatu bentuk aspirasi dari warga agar lingkunganya ingin bersih dari sampah.

d. Anggaran

Sumber keuangan program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R ini bersumber dari berbagai sumber pendanaan. Pendanaan tersebut berasal dari pemerintah dan dari pihak ketiga serta bersumber dari dana swadaya masyarakat sendiri. Adapun rincian dari pendanaan tersebut ialah:

1. Dana APBN : Berupa dana hibah pembangunan serta sarana dan prasarana Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan pagu dana sebesar Rp. 550.000.000,-
2. Dana APBD : jumlah besarnya dana dari APBD masih mengetahui besarnya.
3. Dana Swadaya : berupa dana urunan awal dari penerima manfaat sebesar Rp.1.500.000,- untuk kegiatan operasional KSM” Anugrah Bumi Lestari” serta iuran warga untuk operasional Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R.
4. Dari pihak ketiga : berupa dana bantuan berupa CSR jika mendapat bantuan nantinya.

Dalam melakukan proses pencairan pihak KSM akan mengikuti prosedur pencairan yang telah dijelaskan dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan program tempat pengelolaan sampah TPS 3R, adapun tahapannya disesuaikan dengan sumber pendanaan, Sumber dana untuk penyelenggaraan program tempat pengelolaan sampah TPS yakni meliputi;

1. Dana APBN digunakan untuk kebutuhan biaya investasi prasarana dan sarana pada tempat pengelolaan sampah TPS 3R
2. Dana APBD digunakan untuk kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R (termasuk untuk penggajian operator secara profesional, penyediaan bahan bakar, tagihan air-listrik serta perbaikan sarana prasana) dan untuk biaya membuat akta notaris dari KSM sampai dengan pengelolaan TPS 3R dapat bersifat mandiri.
3. Kontribusi dari masyarakat berupa:

- a. Dana tunai (*in cash*) untuk membuka rekening bank atas nama KSM dan biaya awal operasional dan pemeliharaan minimal sebesar Rp.1.500.000, dana tunai ini dapat diperoleh dari dana iuran rutin masyarakat yang akan digunakan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R. Besaran dari iuran warga ini di musyawarahkan melalui rembuk warga, pengumpulan dana iuran masyarakat tersebut dilakukan oleh KSM.
 - b. Dana non tunai (*in kind*) berupa lahan, barang, material, tenaga kerja, konsumsi dan lain-lain.
4. Sumber dana lainnya, sumber dana ini dapat berupa dana CSR, swasta dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk operasional dan keberlanjutan dari program TPS 3R.

Pernyataan diatas atau data di dukung oleh ibu wiwik selaku bendahara KSM:

“Iya mbak bahwa anggaran untuk pembangunan hanggar dan fasilitas untuk menunjang program ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KSM membuka rekening bank atas nama KSM, buku rekening ditandatangani oleh 3 orang (Ketua KSM, Bendahara KSM dan satu orang perwakilan calon penerima manfaat)Penyaluran dana bantuan kepada KSM pelaksana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan-ketentuan. Kemudian untuk menunjang kebutuhan biaya operasional dari iuran warga setiap bulan”(wawancara tanggal 10 April 2018 pukul 10.30 WIB dikantor TPS)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa anggaranya untuk pembangunan program ialah dari pemerintah kemudian untuk biaya operassionalnya dari iuran masyarakat sertiap bulannya, dari partisipasi masyarakat tidak hanya untuk menghasilkan ide maupun persepsi. Partispasi masyarakat selain dengan

mengusulkan tenaga maupun pikiran dalam suatu hubungannya dengan proses pembangunan desa dalam mewujudkan keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam memberikan iuran setiap bulannya untuk keberlanjutan program tersebut.

e. Partisipasi masyarakat dalam program tempat pengelolaan sampah (TPS 3R)



Gambar : 4.6Partisipasi masyarakat

Sumber: dokumentasi KSM Desa Karanganom tahun 2017

Partisipasi atau pemberdayaan masyarakat yang dimaksud keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung yakni masyarakat tersebut ikut berpartisipasi langsung dalam hal memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang di laksanakan, kemudian yang di maksud partisipasi tidak langsung yang berarti dapat berupa iuran, sumbangan pemikiran atau ide-ide serta material kecil jika masih ada

yang di perlukan. Oleh sebab itu partisipasi non fisik yakni memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu lain atau sebaliknya jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik, memberikan bentuk bahwa perilaku seseorang dapat mempengaruhi lingkungannya, hubungan tersebut dapat antara individu maupun dengan kelompok. Keikutsertaan adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini serupa dengan juga serupa dengan yang di ungkapkan oleh ibu Ririn selaku sekretaris KSM:

”partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan masyarakat, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya karena mereka akan lebih merasa mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki dan mempunyai kewajiban unntuk bertanggungjawab” (Hasil wawancara tanggal 20 April 2018 pukul 10.00 WIB)

Bentuk dukungan masyarakat terhadap program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat yang diprogramkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016, maka dengan musyawarah mufakat masyarakat melakukan rembuk warga yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tim Teknis Kabupaten, Koordinator Kotaku (PNPM Perkotaan Kabupaten), perwakilan BPD, LPM, RW, RT, Tokoh masyarakat, PKK dan Warga. Dari hasil rembuk warga tersebut maka terbentuklah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang nantinya akan melakukan proses pelaksanaan kontruksi bangunan Tempat Pengelolaan Sampah TPS 3R. Berdasarkan kesepakatan

bersama maka KSM yang terbentuk tersebut diberi nama KSM “Anugerah Bumi Lestari”.

Berdasarkan hasil musyawarah peserta sosialisasi Desa para pengurus KSM pelaksanaan konstruksi TPS 3R yang dipilih secara musyawarah dan mufakat, selanjutnya KSM akan disahkan oleh Kepala Desa dan Tim Teknis Kabupaten dengan dibuatkan SK pengesahan untuk memperkuat kelembagaan KSM pelaksana konstruksi TPS 3R. Sebagaimana yang tertuang didalam petunjuk teknis pelaksanaan maka secara umum tugas dan tanggungjawab KSM akan mengikuti apa yang telah dijadikan panduan pelaksanaan program TPS 3R berbasis masyarakat. Secara umum tugas KSM yakni mensosialisasikan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi , memantau, mengevaluasi dan mengelola kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan sampah sekaligus dalam pengelolaan sampah, karena keberhasilan dalam pengelolaan sampah terdapat pada kontribusi partisipasi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) membutuhkan keikutsertaan dari masyarakat, tanpa adanya keikutsertaan masyarakat juga tidak berjalan dengan baik begitupun sebaliknya.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R desa Karangnom selain dalam bentuk jasa, partisipasi masyarakat juga dalam bentuk uang , dalam bentuk uang partisipasi masyarakat tidak besar karena pembangunan TPS 3R dana di peroleh dari APBN, masyarakat hanya membayar

retribusi setiap bulanya sebesar Rp.10.000. Hal juga di dukung dengan pernyataan ibu wiwik selaku bendahara KSM :

”Untuk masalah gedung dan fasilitas lainnya untuk menunjang keberlangsungan dalam pengelolaan sampah semua itu dari pemerintah dana dari APBN, terus dari masyarakat sendiri padahal hanya membayar uang iuran setiap bulanya hanya Rp.10.000 saja itu pun tidak semua warga mau, padahal uangnya itu nanti juga untuk membayar petugas pengambil dan pemilah sampah, selain itu juga masih ada beberapa warga yang membakar sampah” (Hasil wawancara tanggal 20 April 2018 pukul 09.30 WIB)

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan desanya. Dalam proses pengelolaan sampah, hal ini seperti yang di ungkapkan bu siti selaku warga kelurahan Karanganom:

“Kalau partisipasi dalam bentuk tenaga saya ikut berpartisipasi kalau ada kerja bakti dan saya melakukan pewadahan sampah saya sendiri, tetapi belum sempat melakukan pemilahan sampah melakukan pemilahan sampah sendiri, dan mengenai uang tiap bulanya itu saya ikut mbk soalnya dengan adanya program ini saya tidak repot lagi membuang sampah”.

Pemerintah daerah melibatkan masyarakat yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kelurahan Karanganom, adapun bentuk dari keterlibatan masyarakat dengan selain membayar iuran/retribusi serta membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan karena pengelolaan sampah di kelurahan Karanganom membutuhkan orientasi bersama agar dapat dikelola dengan baik.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karanganyam

a. Faktor yang mendukung Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karanganyam

Dari beberapa penjelasan yang telah di jabarkan diatas faktor yang mendukung berjalanya program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R disini menurut bapak Ari selaku kasi bidang cipta karya:

1. Adanya Kerjasama dan dukungan

”Kami selalu melakukan kontak dengan pemerintah daerah maupun warga Kelurahan Karanganyam dalam pelaksanaan agar dari pihak pemerintah daerah bisa memberikan saran serta sosialisasi bagaimana sebaiknya perubahan yang harus dilakukan terhadap warga Kelurahan Karanganyam”(wawancara 10 April 2018 pukul 09.00 WIB dikantor Dinas PU)

Saling bekerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kelompok Swadaya Masyarakat maupun warga kelurahan Karanganyam serta instansi lainnya yang terkait dalam pembuatan, proses dan pelaksanaan program tempat pengelolaan sampah sehingga dengan adanya kerjasama ini maka bisa berjalan baik sesuai dengan tujuan. Dukungan dari pemerintah tentang pengelolaan sampah dapat menjaga lingkungan bersih hal itu juga mengajarkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Menjadi faktor pendukung yang sangat penting, dimana para aktor saling terkait dalam sebuah proses inovasi yang akan menghasilkan keseimbangan dalam pelaksanaannya. Adanya dukungan dari pemerintah disini lebih kepada penyediaan fasilitas dan turut dalam sosialisasi

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Ririn selaku sekretaris KSM:

”Iya mbk jadi adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan pengelolaan sampah TPS 3R di kelurahan Karangnom pemerintah yang menyediakan atau membangun pengelola yang mengelola, sedangkan masyarakat membayar iuran”. (wawancara 11 April 2018 pukul 09.00 WIB dikantor TPS)

Tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R seiring tetap berjalan jika swadaya tidak mampu disikapi oleh pemerintah daerah, karena kita tempat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kita sendiri tanpa masyarakat tidak bisa berjalan lancar di sini, tanpa pemerintah juga tidak bisa, jadi harus saling adanya keterpaduan.

2. Anggaran dan fasilitas

Dari segi anggaran dalam pembuatan bangunan program tempat pengelolaan sampah di Kelurahan Karangnom di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga anggaran tidak menjadi kendala dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Ari selaku kasi bidang cipta karya

”Jadi pemerintah yang menyediakan atau membangun dan masyarakat yang membayar iuran. mengenai biaya yang mencukupi pembangunan hanggar, viar dan fasilitas lainnya dari APBN mbak jadi lancar untuk pendirian hangar ini” (wawancara 8 April 2018 pukul 09.00 WIB dikantor dinas PUPR)

Hal ini sependapat dengan pernyataan bapak Toto selaku warga Desa Karangnom:

“iuran yang dilaksanakan warga ialah untuk pengelolaan sampah yaitu tentang kebersihan TPS 3R. iuran tersebut juga berfungsi untuk memberi upah pengambil sampah dari rumah warga dan pemilah sampah serta untuk bayar listrik dan air”. (adanya TPS 3R tersebut juga sangat baik karena dengan

adanya tersebut menjadikan lingkungan lebih bersih dan tertata (wawancara 8 April 2018 pukul 09.00 WIB dikantor TPS)

Berdasarkan penjelasan diatas kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah dengan menerapkan iuran kepada masyarakat dimana iuran tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang membuang sampah memiliki tanggung jawab bersama untuk membiayai pengelolaan sampah yang ada di kelurahan Karanganom. Kemudian menunjukkan bahwa bangunan fisik di bangun oleh pemerintah sedangkan masyarakat membayar iuran sehingga kerjasama yang terjalin ialah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bu Yuniati selaku kepala desa kelurahan Karanganom:

“Ya mbak salah satu yang mendukung itu dari segi ketersediaan fasilitas, Jadi tanah atau tempat untuk pembuatan hanggar ini dari tanah bengkok dari lurah mbak, trus untuk fasilitas lainnya dari pusat”
(wawancara 10 April 2018 pukul 09.00 WIB dibalai desa Kelurahan Karanganom)



Gambar : 4.7 Pengelolaan sampah

Sumber: dokumentasi KSM Desa Karangnom 2017

Ketersediaan tempat pengelolaan sampah TPS 3R untuk ikut melaksanakan yaitu ketersediaan lahan dari kelurahan Karangnom itu sendiri, diperkuat dengan surat dari kesediaan lahan yaitu surat tidak keberatan lahan kemudian melakukan beberapa langkah koordinasi dengan dinas terkait dan dapat memberikan surat keterangan tanah dapat dipakai untuk kegiatan TPS 3R. Di lahan ini akan di bangun terdiri dari bangunan kantor, gudang, area kompos, viar dan fasilitas lainya sekaligus tempat sampah sementara untuk pemindahan sampah ke TPA.

a. Faktor penghambat Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karanganom

Dalam pelaksanaan koordinasi program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R di kelurahan Karanganom sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan yang merupakan suatu penghambat dalam upaya proses pengelolaan sampah di Kelurahan Karanganom hal ini menyangkut pola pikir masyarakat, melalui wawancara ibu Yuniati selaku Kepala desa Kelurahan Karanganom:

“ya kita berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, salah satunya dengan mengikuti program ini sehingga masyarakat agar antusias dengan program tersebut. Tujuannya agar masyarakat peduli terhadap sampah bagaimana cara mengelola sampah minimal pada level rumah tangga. (wawancara 8 April 2018 pukul 10.00 WIB di balai desa kelurahan karanganom)

Hal ini didukung oleh pernyataan ibu wiwik selaku bendahara KSM

“iya mbk jadi pola pikir masyarakat juga merupakan penghambat, kemarin masih adanya masyarakat yang membuang sampah di sungai dan membakar sampah mbk, trus ada juga yang tempat sampah yang di sediakan di setiap rumah di tengkurapkan dengan artian tidak mau ikut program ini mbk. Tapi kita tetap mengadakan pengertian kepada masyarakat tersebut tentang bahayanya sampah jika tidak dikelola dengan baik”

“tidak semua orang tau kalau sampah itu masalah karena mereka sudah memiliki kebiasaan membuang sembarangan, bayangkan saja kalau sampah ditumpuk di samping rumah mereke dan tidak mau dibuang ke tempat yang ada, mereka akan tau kalau rumah mereka akan kumuh karena banyak sampah. (wawancara 8 April 2018 pukul 10.00 WIB di balai desa kelurahan karanganom)

Masyarakat memerlukan kesadaran tentang cara pandang pengelolaan sampah yang awalnya dengan kebiasaan dibakar, ditimbun dan di buang ke sungai menjadi sistem 3R yakni *recycle, reduce, reuse*. Pandangan beberapa masyarakat Kelurahan

Karanganom terhadap sampah sebenarnya sudah mengetahui apa itu sampah dan bahaya sampah. Masyarakat akan melakukan suatu tindakan yang dirasa mudah untuk dilakukan misalnya tidak membuang sampah sembarangan jika tersedia banyak tempat sampah.

Pola pikir masyarakat juga merupakan faktor yang penting dalam implementasi program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R, dalam hal ini masih adanya masyarakat yang bersifat acuh terhadap pentingnya mengelola sampah maka dari itu butuh waktu bagi kelompok swadaya masyarakat untuk menyadarkan masyarakat melalui berbagai macam cara salah satunya dengan mengadakan sosialisasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Yuniati selaku Kepala desa kelurahan Karanganom:

”tidak hanya soal pola pikir mbk, ketika dari segi pemahaman komunikasi juga menjadi kendala yang mengakibatkan pola pikir masyarakat tidak sependapat. Padahal kita memberikan materi sama mbak namun penangkapan dari masyarakat berbeda-beda maka dari itu terkadang itu yang menjadi sedikit terhambat dari program ini mbak”(wawancara 8 April 2018 pukul 10.00 WIB di balai desa kelurahan Karanganom)

Penerimaan pemahaman yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi berjalanya program tersebut, komunikasi yang kurang baik mengakibatkan pola pikir masyarakat tidak sependapat dengan adanya program tempat pengelolaan sampah merupakan faktor penghambat dalam kelancaran mencapai tujuan.

C. ANALISIS DATA

1. Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karangnom meliputi:

a. Kebijakan program

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dengan melibatkan masyarakat karena pada dasarnya yang menghasilkan sampah adalah masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana sulitnya mengelola sampah. Persepsi masyarakat selama ini mengenai sampah adalah membuang saja dan tidak mau tahu akhirnya, persepsi masyarakat yang demikian menyulitkan untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik, karena itu sudah tepat apabila dalam hal pengelolaan sampah juga melibatkan masyarakat sehingga pola pikir masyarakat bisa berubah menjadi membuang sampah pada tempatnya dan selanjutnya masyarakat dapat mengelol sampah menjadi mungkin bentuk yang dapat dimanfaatkan karena memiliki nilai ekonomis.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah ialah dengan menerapkan iuran kepada masyarakat dimana iuran tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang membuang sampah memiliki tanggung jawab bersama untuk membiayai pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Karangnom. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, masyarakat dan

pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggungjawab dalam mengelola sampah. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan poin d yaitu :bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Sedangkan mengenai tugas pemerintah daerah adalah sebagaimana dicantumkan pada pasal 6 tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan penanganan sampah
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat dan hasil pengolahan sampah
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang opada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian keempat undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur wewenang pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dicantumkan pada pasal 9 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

1. Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (dalam Tjiptoherijanto dan Manarung, 2010:112) adatinga fungsi administrasi publik diantaranya terdapat mengenai kebijakan yang terdapat pada poin pertama yang berbunyi Formulasi atau perumusan kebijakan, Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan.

Kemudian dalam kebijakan ini selain menurut Undang-undang juga menggunakan teori implementasi kebijakan yang di uraikan oleh Grindle dan teori Edward III, dalam teori Grindle di jabarkan bahwa setiap kebijakan memiliki beberapa komponen yaitu aktor pelaksana kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan manfaat atau dampak dari kebijakan yang diambil. Berdasarkan teori tersebut maka dapat diketahui bahwa aktor implementasi kebijakan terdiri dari beberapa aktor yakni pemerintah, swasta dan LSM dan masyarakat, selanjutnya keseluruhan aktor tersebut terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi. Selanjutnya dari situlah dapat memberikan dampak dan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak atau manfaat terhadap lingkungan dan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan pengaturan pada pasal-pasal tersebut maka diharapkan pengelolaan sampah optimal sehingga pendapat yang hanya memindahkan sampah yaitu mengumpulkan sampah kemudian diangkut dan dibuang di tempat sampah dapat dirubah dengan pola pemanfaatan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak dari pembuangan sampah dari limbah rumah tangga sebagai penghasil sampah pertama kali, selain itu bahwa dalam perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan dilakukan analisis kebijakan hal ini dilakukan untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja dalam mencapai tujuanmemperkirakan masa sekarang dan masa mendatang menyusun langkah-langkah alternatif.

b. Program TPS 3R

David C Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu meliputi yang pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga,

kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pendapat David C Korten diatas berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program agar di nyatakan berhasil. Program ini akan berhasil dengan melewati kesesuain ke tiga elemen diatas dengan penjelasan sebagai berikut: Program yang di buat oleh pemerintah telah sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh Kelurahan Karangnom yaitu dengan memfasilitasi untuk mengelola sampah sehingga masyarakat menerima manfaat dengan adanya pengelolaan sampah, dalam hal ini yang menjadi sebagai pemangku wewenang dalam kegiatan pelaksanaan ialah kelompok swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat ini orang-orang yang telah di pilih dan di setuju oleh semua pihak untuk mengatur maupun mengelola agar berjalan lancar kemudian pemanfaatanya sendiri sudah bisa di rasa dengan tidak lagi tercemarnya sungai atas pembuangan sampah, pembakaran sampah dan setelah pemilahan sampah ada sampah yang didaur ulang maupun dijadikan kompos.

Sedangkan menurut pendapat Ashiong (2015:4-5) Program juga disebut sebagai hal yang termasuk di dalamnya serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik yang diidentifikasi,

adanya partisipasi individu atau kelompok, adanya konteks tertentu, menghasilkan *output* terdokumentasi, hasil dan dampak adanya sistem keyakinan yang terlaksana dengan program kerja dan memiliki manfaat.

Sedangkan menurut Abdullah (1987:17) hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses program terdapat tiga unsur mutlak antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya program yang dilaksanakan jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut
- b. Target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan. Jadi dari pelaksanaan program yang telah dibuat tersebut diharuskan memberi dampak positif pada masyarakat yang menjadi target
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Seperti halnya program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R di kelurahan Karangnom yang di buat oleh aparaturn pemerintah ini dimana di dalamnya terdapat kegiatan yang berbeda-beda sebagai perannya tetapi memiliki satu tujuan yang sama dari kegiatan pengelolaan sampah tersebut agar membuat sampah yang ada dapat memiliki nilai ekonomis serta menjadi suatu benda yang tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur oleh kelompok swadaya masyarakat maupun seluruh warga kelurahan Karangnom dengan memilah sampah, mengelola sampah kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan

lingkungan yang bersih. Dengan adanya realisasi dalam perencanaan serta proses integrasi keseluruhan akan menghasilkan output yang dapat di rasakan manfaatnya oleh kelurahan Karanganom.

c. Aktor yang terlibat dalam program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat

Kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberdayakan kepentingan masyarakat agar lebih mandiri dalam masalah pengelolaan sampah agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab secara bersama-sama terpadu. Sampah merupakan masalah hampir di setiap daerah , termasuk daerah kelurahan Karanganom maka sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri karena sampah dapat mengeluarkan limbah yang berbahaya bagi manusia. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung membangun Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan melibatkan peran masyarakat hal ini disebabkan sebagian sampah yang ada dikelurahan Karanganom ialah limbah domestik khususnya sampah rumah tangga.

Dalam pembentukan dan pengimplementasiannya sebelum menjadi sebuah program yang unggul, program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R melewati beberapa unsur-unsur tertentu agar program (TPS) 3R ini dapat dapat terbentuk dan berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuannya dari proses awal hingga bantuan turun ke penerima bantuan. Hal ini sesuai menurut pendapat Tjokroamidjojo (dalam Tjiptoherijanto dan Manarung, 2010:112) diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Formulasi atau kebijakan

Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan.

b. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi

Unsur-unsur administrasi yang perlu di kelola adalah (struktur) organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut.

c. Penggunaan dinamika administrasi

Dinamika administrasi (*the dynamics of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi pengawasan, dan komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas menurut pendapat Tjokroamidjojo (dalam Tjiptoherijanto dan Manarung,(2010:112) bahwa ada beberapa unsur yang harus di perhatikan dalam pembentukan program dan pengimplementasiannya diantaranya ialah formulasi atau kebijakan yakni pemerintah melalukan analisis kebijakan apa yang harus ditetapkan dan dilakukan untuk masa sekarang dan memikirkan masa yang akan datang tanpa merugikan generasi selanjutnya dengan menyusun program/strategi. Yang kedua pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi, dalam hal pemerintah memberikan anggaran serta fasilitas yang di butuhkan dalam pembentukan suatu program serta pemerintah perlu memerhatikan pemangku

wewenang dalam struktur organisasi suatu program dengan adanya peraturan yang telah dibentuk sebelumnya. Dan yang ke tiga penggunaan dinamika administrasi yaitu adanya pemimpin yang mampu mengkoordinasikan ,pengawasan dan komunikasi sehingga dapat menjalankan suatu kebijakan dalam keberlanjutan suatu program.

Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting berpengaruh terhadap perubahan lingkungan dalam bentuk suatu kebijakan dan fasilitas maupun anggaran serta struktur organisasi dalam berjalanya sebuah program/strategi. Selanjutnya dari sudut pandang peran masyarakat di kelurahan Karangnom dalam pelaksanaan program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R ini secara umum bisa dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat bahwa program ini masih berjalan dengan baik. Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meliputi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, swadaya masyarakat, pembuangan sampah pada tempat yang telah di sediakan, kegiatan ini yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan serta proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode *reuse, reduce, recycle*.

Seperti yang jabarkan Hikmat (2006:9) partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam gerakan pembangunan harus selalu di dorong dan ditumbuh kembangkan secara bertahap dan keberlanjutan. Sumber partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial yang merupakan hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita bersama, dalam hal ini



seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahumembahu, saling membantu mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Koentjaraningrat (1998:79) menyatakan bentuk partisipasi yang merupakan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan setidaknya terdapat dua tipe partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi dalam aktivitas bersama kelompok gotong royong dalam proyek-proyek pembangunan
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa hubungan masyarakat satu dengan yang lainnya saling terkait dimana dalam hal ini masyarakat mempunyai wewenang yang menyangkut pelestarian lingkungan serta dengan adanya pelaksanaan program masyarakat dapat bergotong royong. Masyarakat sebagai pemelihara dan memanfaatkan pembangunan untuk keberlangsungan program kemudian masyarakat diarahkan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R dilihat dari pra pengelolaan, proses pengelolaan, dan paska pengelolaan.

Suatu implementasi program diperlukan organisasi pelaksana yang merupakan salah satu faktor penting, sama halnya dalam program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R perlu adanya pembentukan organisasi pelaksana yang telah di pilih dan disetujui oleh semua pihak. Anggota orgnisasi pelaksana dari program tempat pengelolaan sampah sendiri dari warga kelurahan Karangnom yang telah dipilih yang dinamakan kelompok swadaya masyarakat.

Hal ini sesuai menurut pendapat Abdullah (1987:17) yakni hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses implementasi program sekurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, salah satu diantaranya ialah unsur pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan program tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat hal yang penting dalam menjalankan suatu program karena Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan tangan kanan dari pemerintah yaitu yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan program tempat pengelolaan sampah, yang mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah di sediakan dan juga mempunyai tanggung jawab dan atas campur tangan suatu organisasi pelaksana dapat berjalanya program tersebut.

Hal ini diperjelas dengan penyajian data yang telah dijelaskan kerjasama antara pemerintah dengan warga kelurahan Karangnom dalam pengelolaan sampah. Kerjasama yang dilakukan ialah dengan cara pemerintah menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R serta Pemerintah memberikan sarana dan prasarana pada TPS 3R dan warga di bantu oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R tersebut. Adanya Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R tersebut memberikan keuntungan warga agar dapat menjaga lingkungan, pengelolaan tersebut juga memberikan manfaat dengan adanya sinergitas, kerjasama tersebut nantinya juga mendapat manfaat yang di

rasakan dari kedua belah pihak antara warga dengan pemerintah agar lingkungan menjadi bersih, kemudian masyarakat dapat memperoleh kenyamanan kebersihan dan pemerintah merasakan lingkungan yang ada pada wilayahnya menjadi lingkungan yang nyaman untuk dihuni dengan sampah yang dikelola dengan baik dan benar. Terkait dengan bentuk kerjasama pada TPS 3R kelurahan Karanganom yaitu forum komunikasi yang dilakukan oleh KSM kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Kaya. Komunikasi tersebut dilakukan secara dua arah antara KSM dan juga warga kelurahan Karanganom kepada pemerintah mengenai pengelolaan TPS 3R. Berdasarkan penjelasan tersebut bentuk kerjasama pengelolaan sampah TPS 3R di fasilitasi oleh kelompok swadaya masyarakat, kemudian aspirasi yang dilontarkan adalah pengelolaan sampah dengan baik sehingga lingkungan kelurahan Karanganom khususnya dapat bersih dan terjaga.

d. Anggaran

Anggaran merupakan manajemen perwujudan dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi. Komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk pengembangan. Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat termasuk di alam kegiatan rutin. Aspek pembiayaan merupakan sumber dari penggerak roda

sistem pengelolaan sampah kota, yang merupakan aspek yang mempengaruhi pengelolaan sampah yaitu finansial dan ekonomi (Damanhuri, 2016:6-8)

Selanjutnya menurut pendapat Wahab (2012:91) mengatakan bahwa ada beberapa hal penting dalam melaksanakan program yakni:

- a. Struktur organisasi yang berkaitan dengan interaksi, hierarki, tujuan dan sifat-sifat.
- b. Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Sumber sarana dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.
- d. Metode kerja/prosedur kerja, yaitu berhubungan atau berkoordinasi dengan system dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerjasama secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif.
- e. Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal, dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum.
- f. Anggaran dana.

Berdasarkan pendapat dari kedua para ahli tersebut salah satu yang terpenting dalam implementasi program ialah anggaran dana, besaran dana yang dipersiapkan sangat mempengaruhi jalanya suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini untuk mengenai anggaran dalam hal pembangunan infrastruktur untuk pembangunan hanggar tempat pengelolaan sampah serta fasilitas lainnya di Kelurahan Karanganyar dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian untuk biaya operasional dalam melaksanakan program tersebut dari iuran masyarakat setiap bulanya.

Ketersediaan anggaran dari pemerintah maupun retribusi/iuran dari masyarakat untuk keberlangsungan dalam menjalankan program. Tempat Pengelolaan Sampah TPS 3R yang mana menunjang untuk penanganan sampah, merupakan faktor pendukung dari segi fasilitas dimana dengan adanya fasilitas yang memadai akan membantu masyarakat untuk pengelolaan sampah, selain itu juga menyediakan fasilitas untuk monitoring agar masyarakat termotivasi dan lebih giat dalam menjaga lingkungan. Penyediaan fasilitas yang juga merupakan bentuk pemberdayaan merupakan bentuk dukungan.

Anggaran adalah rencana manajemen, dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksana anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun, anggaran merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran sektor publik sendiri harus bersifat partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat diakomodasi dalam anggaran. Anggaran sektor publik

merupakan blue print organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik.

e. Partisipasi masyarakat dalam program tempat pengelolaan sampah (TPS 3R)

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat sering dikaitkan dengan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Hikmat (2006:9) partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam gerakan pembangunan harus selalu didorong dan ditumbuh kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Koentjaraningrat (1998:79) menyatakan bentuk partisipasi yang merupakan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan setidaknya terdapat dua tipe partisipasi yaitu:

- 1) Partisipasi dalam aktivitas bersama kelompok gotong royong dalam proyek-proyek pembangunan
- 2) Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Berdasarkan pendapat diatas partisipasi masyarakat di kelurahan karanganom juga melibatkan gotong royong dimana dalam hal ini memiliki hubungan erat antara

individu satu dengan yang lain atau sebaliknya untuk berjalanya program tempat pengelolaan sampah. Kemudian partisipasi individu diluar aktivitas bersama yakni melakukan pembuangan sampah di tempat yang telah di sediakan. Hal ini merupakan salah satu faktor untuk memecahkan permasalahan karena keberhasilan dalam suatu program terdapat pada kontribusi partisipasi masyarakat itu sendiri. Kemudian masyarakat melakukan kegiatan individu yaitu dengan mengumpulkan dan membuang sampah di tempat yang telah disediakan dengan sendirinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 (pasal 2 ayat 4 huruf d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Menurut Hikmat (2006:9) partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam gerakan pembangunan harus selalu di dorong dan ditumbuh kembangkan secara bertahap dan keberlanjutan. Sumber partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial yang merupakan hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita bersama, dalam hal ini seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu membahu, saling membantu mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meliputi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tergantung dari cara pendekatan pemerintah dalam mensosialisasikan program-programnya dalam penanggulangan kebersihan. Beberapa dari masyarakat terpilih menjadi anggota kelompok swadaya masyarakat yang berperan langsung dalam keberlangsungan pengelolaan sampah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karangnom

a. Faktor Pendukung

1. Adanya kerjasama dari pemerintah daerah maupun pusat serta kelompok swadaya masyarakat.

Bentuk dari organisasi masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah yang memiliki tujuan yang sama, namun pembagian tupoksinya berbeda antara yang satu dengan yang lain bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah program TPS 3R, masing-masing pihak dapat memiliki bagian yang lebih besar ataupun lebih kecil. Suatu pembaharuan yang sifatnya masal, karena menyangkut beberapa *stakholder* dalam pelaksanaannya memang diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan dan menunjukkan kesiapan suatu kelompok kerjasama. Beberapa masyarakat dibekali yang cukup baik terkait pengelolaan sampah dan bahanya sampah melalui sosialisasi.

Faktor pendukung tersebut dengan kata lain ialah kesiapan dalam melakukan pembaharuan, kesiapan ini diperlukan demi terlaksananya program pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat yang mana suatu inovasi dapat berjalan dengan adanya kerjasama Berdasarkan uraian tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasolong (2012:57) adalah suatu kerjasama atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kelompok yang berada dalam suatu negara dalam fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi publik sebagai ilmu yang mempunyai artian luas, memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya.

Pemerintah menyediakan fasilitas penunjang guna terselenggarakannya pengelolaan sampah yang baik dan menyeluruh di kelurahan Karangnom, merupakan suatu konsep pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dari pada itu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat memberikan buah pikiran dalam proses pembangunan.

Selanjutnya agar kerjasama dari pemerintah daerah maupun pusat serta kelompok swadaya masyarakat agar berjalan efektif, Keraf (2002:175) menyebutkan salah satu faktor agar kerjasama berjalan efektif yaitu Prinsip keadilan yang pada dasarnya menjamin bahwa semua orang atau kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Dalam prinsip keadilan juga menuntut

agar ada peluang yang sama bagi generasi masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber daya ekonomi yang tersedia.

Berdasarkan uraian di atas menurut pendapat Keraf (2002:175) bahwa ada salah satu faktor agar kerjasama berjalan efektif yaitu Prinsip keadilan dimana dalam hal ini masyarakat kelurahan Karanganyar ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan dan pengelolaan sampah dengan sebaik-baiknya, semua masyarakat hendak dapat memanfaatkan hasil pengelolaan dan pembangunan yang baik namun tidak hanya sebatas memanfaatkannya tetapi juga ikut menjaga dan memelihara agar dapat di manfaatkan generasi yang akan datang.

2. Anggaran dan fasilitas

Besaran dana dan terpenuhinya fasilitas yang dipersiapkan sangat mempengaruhi jalannya suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Perencanaan dana ini bertujuan agar dalam proses pengimplementasiannya tidak memakan biaya lebih dari yang sudah ditetapkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan Wahab (2012:91) mengatakan beberapa mengenai hal-hal penting dalam implementasi program yakni:

- a. Sumber sarana dan prasarana berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.
- b. Anggaran dana.

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan tempat pengelolaan sampah di kelurahan Karanganyar dana merupakan salah satu penggerak utama yang

menentukan dalam penyelenggaraan, dana tersebut di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan hanggar dan fasilitas. Selanjutnya keterlibatan masyarakat kelurahan Karanganom dalam menggerakkan menghimpun dana yang di peroleh setiap bulannya untuk keberlangsungan pengelolaan sampah kemudian dana tersebut untuk gaji para pengelola sampah.

Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung ingin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Karanganom, dengan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah ialah dengan membayar iuran dimana apabila iuran tersebut dapat maksimal maka pengelolaan sampah di Kelurahan Karanganom bisa maksimal dan berjalan terus. Pengelolaan sampah di kelurahan Karanganom bisa maksimal juga di pengaruhi oleh iuran karena dengan optimalnya iuran maka dapat membayar petugas yang mengelola sampah mulai dari mengambil sampah dari rumah warga hingga pemilahan tersebut selain itu juga pengelolaan dapat memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi yang lebih baik dengan semakin meningkatnya iuran yang diterima oleh pengelola sampah di kelurahan Karanganom.

2. Faktor Penghambat Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karanganom

Pola pikir masyarakat

Pola pikir dari masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R, persoalan pola pikir dari masyarakat menentukan sejauh mana masyarakat dapat menerima program yang dibuat oleh

pemerintah yang ditujukan dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson dalam Sunggono (1994:23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu program dikarenakan:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima program pemerintah;
- c. Adanya keyakinan bahwa program tersebut dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan program karena program itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

Berdasarkan pendapat James Anderson dalam Sunggono faktor penghambat yang dipicu dari faktor persoalan pola pikir dari masyarakat menentukan berjalanya suatu program, kemudian agar suatu program dapat berjalan dengan baik dengan mengimplementasikan unsur-unsur tersebut. Pelaksanaan program seharusnya perlu didukung dan diterima oleh masyarakat apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati suatu program maka suatu implementasi program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tetapi pada program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R ini belum berhasil sepenuhnya karena ada kendala pola pikir masyarakat yang menganggap program ini tidak terlalu penting, dan sedikit keberatan membayar iuran tiap bulanya, mereka beranggapan bahwa sampah tidaklah terlalu penting

untuk di kelola. Sehingga masih ditemukannya masalah pola pikir masyarakat bahayanya jika sampah tidak dikelola sejak dini.

Penerimaan masyarakat yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi berjalanya inovasi ada yang berhasil dan ada yang gagal. Tidak dapat dipungkiri kemampuan setiap individu berbeda ada yang dapat melaksanakan dan mengeksplor lebih baik sehingga menjadi berhasil. Ada juga yang justru tidak berkembang karena masyarakat tidak menerima secara utuh informasi yang di sampaikan dan berpengaruh pada kegagalan. Komunikasi sangat penting dalam berjalanya inovasi karena dengan komunikasi yang baik dan di bantu dengan dukungan monitoring akan memperlancar berjalanya pengelolaan sampah. Motivasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam berjalanya suatu program, dimana melalui motivasi maka masyarakat atau target dari inovasi dapat lebih terarah dan sesuai hasil yang dicapai. Motivasi membawa peranan yang penting guna meningkatkan kemauan maupun kemampuan.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir penulisan skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan serta saran sebagai hasil penelitian dan pembahasan tentang Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karangnom yang berhubungan dengan permasalahan di dalam fokus penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian di kelurahan Karangnom mengenai program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat sebagai berikut:

a. Kebijakan Program

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, selain itu juga berdasarkan Permen PU Nomor 3 tahun 2013 yaitu tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggungjawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

b. Program

Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut pengaturan yang tepat dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan konsep 3R (*recycle, reduce, reuse*) salah satu cara penerapannya ialah melalui penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R Berbasis Masyarakat.

c. Aktor yang terlibat

Aktor yang terlibat menyangkut beberapa *stakholder* dalam pelaksanaannya memang diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan masyarakat sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan dan menunjukkan kesiapan suatu kelompok kerjasama.

d. Anggaran

Anggaran merupakan instrumen penting dalam melaksanakan rencana-rencana suatu organisasi untuk melayani masyarakat dan juga anggaran menjadi suatu tolak ukur dalam melihat kondisi keuangan baik biaya (pengeluaran) ataupun pendapatan (penerimaan)

e. Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat sering dikaitkan dengan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan dan dalam bentuk iuran.

a. Faktor pendukung

a. Adanya dukungan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat

Sosialisasi aktif dari pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi masalah pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Kemudian adanya koordinasi dan murenbang antara pemerintah dan masyarakat .

b. Anggaran dan fasilitas

Dari segi anggaran dalam pengelolaan sampah menggunakan anggaran milik APBN yang digunakan untuk kebutuhan biaya investasi prasana dan sarana pembangunan, selanjutnya iuran warga digunakana untuk menunjang kebutuhan operasional dan pemeliharaan Tempat



Pengelolaan Sampah (TPS)3R besaran iuran warga ini di musyawarahkan melalui rembug warga.

b. Faktor penghambat

Pola pikir masyarakat

Penerimaan masyarakat yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi berjalanya inovasi ada yang berhasil dan ada yang gagal. Tidak dapat dipungkiri kemampuan setiap individu berbeda ada yang dapat melaksanakan dan mengeksplor lebih baik sehingga menjadi berhasil. Ada juga yang justru tidak berkembang karena masyarakat tidak menerima secara utuh informasi yang di sampaikan dan berpengaruh pada kegagalan. Komunikasi sangat penting dalam berjalanya inovasi karena dengan komunikasi yang baik dan di bantu dengan dukungan monitoring akan memperlancar berjalanya pengelolaan sampah.

Saran

Dari hasil analisis, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kelurahan Karangnom, sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas kepada pengangkut sampah seperti masker, sarung tangan, sepatu serta meningkatkan fasilitas keamanan bagi petugas sampah. Perlu dikembangkan budaya bersih pada masyarakat Desa

Karanganom, yakni suatu pemikiran bahwa kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan bersama, apabila lingkungan kotor dan rusak tentunya yang rugi juga masyarakat itu sendiri bukan hanya pemerintah daerah kabupaten Tulungagung saja. Melalui menjaga kebersihan lingkungan apabila terdapat kebijakan daerah menetapkan adanya wilayah bebas sampah dan meminimalisasi sampah/limbah dengan menggunakan kembali barang bekas sehingga dapat digunakan lagi dan barang yang dapat di dekomposisi secara biologi dan penerapan pembuangan sampah

- b. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta stakeholder dari sekolah-sekolah mulai dari TK, kemudian *home education* agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama.
- c. Perlu adanya partisipasi yang lebih besar lagi dari seluruh lapisan masyarakat dalam hal kesadaran tentang masalah sepele yang sering tidak dihiraukan yaitu membuang sampah sembarangan, dengan meningkatkan koordinasi yang baik antar dinas/instansi, swasta dan masyarakat.

DaftarPustaka

- Agus, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Asdak, Chay. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta :GadjahMada University Press.
- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alikodra, Hadi S. 2012, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi, cetakan ke-1, Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik.. n.d. Geografi Indonesia. <http://www.bps.go.id>
- Creswell, J.W.2012. *Research Design* : Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed. Yogyakarta :Pustaka Belajar
- Chay, Asdak. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis :Jalan menuju pembangunan Berkelanjutan : Yogyakarta : UGM Press.
- Chandler, Ralph C.; Plano, Jack C. 1988.The Public Administration Dictionary. Santa Barbara, California: ABC-Clio.
- Damanhuri, Eriri dan Padi, Tri.2011.Buku Ajar Teknologi Pengelolaan Sampah. Bandung: penerbit ITB.
- _____ 2010. Diklat Kuliah TL 30104: Pengelolaan Sampah. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- <http://eprints.uny.ac.id/9705/2/BAB%202-08110241019.pdf>
- Hikmat, Hary, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora
- Huraerah.Abu.2008.Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan.Bandung:Humaniora

- Indradi, Syamsudin, Sjamsiar. 2010. Malang :Agritek. YPN Malang.
- Kasta Sasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan :Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta : LP3ES.
- Kastman, Roni dan Kramadibrata, Ade Moetangad.2007.Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (silasratu). Bandung: Humaniora.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2015. “Pengenalan Terhadap SNI ISO 14001 : 2015 Sistem Manajemen Lingkungan. “*Leaflet SNI ISO 14001 : 2015*.
- Keraf, A. S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta :BukuKompas.
- Koentjaraningrat. 1998. Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia . Jakarta: Djembatan
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Miles, Hubernmandan Saldana, 2014. *Quantitative Data Analysis A Methods Souncebook Edition 3. United States of America : SAGE Publication, inc.*
- Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.....
- 2007. TeoriAdministrasiPublik. Bandung: PenerbitAlfabeta....
- Pontoh, Nia K & Kustiawan, Iwan. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: Penerbit ITB. Project for Public Spaces, Inc.2008. Streets as Places. New York Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi JawaTimur 2014-2019.
- Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan :Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta :Bumi Aksara
- 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudriamunawar. Haryono. 2012. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Edisirevisi. Bandung : CV. Mandar Maju.

- Sulistiyorini, Lilis. 2005. Pengelolaan Sampah dengan cara Menjadikannya Kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.2, No 1, Juli 2005:77-84///
- Suwerda, Bambang. 2011. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta :Pustaka Rihama.
- S. Alex, 2012 sukses mengelola sampah organik menjadi pupuk organik. Yogyakarta :Pustaka Baru Press.
- Santoso, Sastropetro. 1998. *Partisipasi, Komunikasi Dan Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kenisius
- SNI 19-2454-2002. *Tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung :Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*, Malang :Universitas Negeri Malang.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjibtoherijanto, Priono, dan Mandala Manarung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta : UI- Press.
- Tarigan, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 18. 2008. *Pengelolaan sampah*. Jakarta :Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 (pasal 2 ayat 4 huruf d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta :Graha Ilmu.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir penulisan skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan serta saran sebagai hasil penelitian dan pembahasan tentang Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karangnom yang berhubungan dengan permasalahan di dalam fokus penelitian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian di kelurahan Karangnom mengenai program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat sebagai berikut:

a. Kebijakan Program

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, selain itu juga berdasarkan Permen PU Nomor 3 tahun 2013 yaitu tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggungjawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

a. Program

Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat tidak hanya menyangkut masalah sosial dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tetapi juga menyangkut pengaturan yang tepat dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan konsep 3R (*recycle, reduce, reuse*) salah satu cara penerapannya ialah melalui penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R Berbasis Masyarakat.

b. Aktor yang terlibat

Aktor yang terlibat menyangkut beberapa *stakholder* dalam pelaksanaannya memang diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan masyarakat sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan dan menunjukkan kesiapan suatu kelompok kerjasama.

c. Anggaran

Anggaran merupakan instrumen penting dalam melaksanakan rencana-rencana suatu organisasi untuk melayani masyarakat dan juga anggaran

menjadi suatu tolak ukur dalam melihat kondisi keuangan baik biaya (pengeluaran) ataupun pendapatan (penerimaan)

d. Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat sering dikaitkan dengan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan dan dalam bentuk iuran.

a. Faktor pendukung

a. Adanya dukungan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat

Sosialisasi aktif dari pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi masalah pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Kemudian adanya koordinasi dan murenbang antara pemerintah dan masyarakat .

b. Anggaran dan fasilitas

Dari segi anggaran dalam pengelolaan sampah menggunakan anggaran milik APBN yang digunakan untuk kebutuhan biaya investasi prasana dan sarana pembangunan, selanjutnya iuran warga digunakana untuk

menunjang kebutuhan operasional dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)3R besaran iuran warga ini di musyawarahkan melalui rembug warga.

b. Faktor penghambat

Pola pikir masyarakat

Penerimaan masyarakat yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi berjalanya inovasi ada yang berhasil dan ada yang gagal. Tidak dapat dipungkiri kemampuan setiap individu berbeda ada yang dapat melaksanakan dan mengeksplor lebih baik sehingga menjadi berhasil. Ada juga yang justru tidak berkembang karena masyarakat tidak menerima secara utuh informasi yang di sampaikan dan berpengaruh pada kegagalan. Komunikasi sangat penting dalam berjalanya inovasi karena dengan komunikasi yang baik dan di bantu dengan dukungan monitoring akan memperlancar berjalanya pengelolaan sampah.

Saran

Dari hasil analisis, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kelurahan Karangnom, sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas kepada pengangkut sampah seperti masker, sarung tangan, sepatu serta meningkatkan fasilitas keamanan bagi petugas

sampah. Perlu dikembangkan budaya bersih pada masyarakat Desa Karanganom, yakni suatu pemikiran bahwa kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan bersama, apabila lingkungan kotor dan rusak tentunya yang rugi juga masyarakat itu sendiri bukan hanya pemerintah daerah kabupaten Tulungagung saja. Melalui menjaga kebersihan lingkungan apabila terdapat kebijakan daerah menetapkan adanya wilayah bebas sampah dan meminimalisasi sampah/limbah dengan menggunakan kembali barang bekas sehingga dapat digunakan lagi dan barang yang dapat di dekomposisi secara biologi dan penerapan pembuangan sampah

- b. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta stakeholder dari sekolah-sekolah mulai dari TK, kemudian *home education* agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama.
- c. Perlu adanya partisipasi yang lebih besar lagi dari seluruh lapisan masyarakat dalam hal kesadaran tentang masalah sepele yang sering tidak dihiraukan yaitu membuang sampah sembarangan, dengan meningkatkan koordinasi yang baik antar dinas/instansi, swasta dan masyarakat.

DaftarPustaka

- Agus, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Asdak, Chay. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta :GadjahMada University Press.
- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alikodra, Hadi S. 2012, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi, cetakan ke-1, Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik.. n.d. Geografi Indonesia. <http://www.bps.go.id>
- Creswell, J.W.2012. *Research Design* : Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed. Yogyakarta :Pustaka Belajar
- Chay, Asdak. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis :Jalan menuju pembangunan Berkelanjutan : Yogyakarta : UGM Press.
- Chandler, Ralph C.; Plano, Jack C. 1988.The Public Administration Dictionary. Santa Barbara, California: ABC-Clio.
- Damanhuri, Eri dan Padi, Tri.2011.Buku Ajar Teknologi Pengelolaan Sampah. Bandung: penerbit ITB.
- _____ 2010. Diklat Kuliah TL 30104: Pengelolaan Sampah. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- <http://eprints.uny.ac.id/9705/2/BAB%202-08110241019.pdf>
- Hikmat, Hary, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora
- Huraerah.Abu.2008.Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan

Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora

- Indradi, Syamsudin, Sjamsiar. 2010. Malang : Agritek. YPN Malang.
- Kasta Sasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta : LP3ES.
- Kastman, Roni dan Kramadibrata, Ade Moetangad. 2007. Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (silasratu). Bandung: Humaniora.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2015. "Pengenalan Terhadap SNI ISO 14001 : 2015 Sistem Manajemen Lingkungan. "Leaflet SNI ISO 14001 : 2015.
- Keraf, A. S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta : Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. 1998. Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia . Jakarta: Djambatan
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Miles, Hubernmandan Saldana, 2014. *Quantitative Data Analysis A Methods Souncebook Edition 3. United States of America : SAGE Publication, inc.*
- Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.....
- 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta....
- Pontoh, Nia K & Kustiawan, Iwan. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: Penerbit ITB. Project for Public Spaces, Inc. 2008. Streets as Places. New York Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019.
- Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan : Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta : Bumi Aksara
- 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudriamunawar. Haryono. 2012. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Edisi Revisi. Bandung : CV. Mandar Maju.

- Sulistyorini, Lilis. 2005. Pengelolaan Sampah dengan cara Menjadikannya Kompos. Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol.2, No 1, Juli 2005:77-84///
- Suwerda, Bambang. 2011. Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan). Yogyakarta :Pustaka Rihama.
- S. Alex, 2012 sukses mengelola sampah organik menjadi pupuk organik. Yogyakarta :Pustaka Baru Press.
- Santoso, Sastropetro. 1998. Partisipasi, Komunikasi Dan Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kenisius
- SNI 19-2454-2002. Tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.
- Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung :Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung :Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan, Malang :Universitas Negeri Malang.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjibtoherijanto, Priono, dan Mandala Manarung. 2010. Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta : UI- Press.
- Tarigan, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat, Tesis Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 18. 2008. Pengelolaan sampah. Jakarta :Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 (pasal 2 ayat 4 huruf d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta :Graha Ilmu.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah kota di Indonesia yang begitu pesat merupakan pemicu dari pembangunan infrastruktur dan perkembangan sektor jasa. Hal ini berkaitan dengan struktur pertumbuhan ekonomi perkotaan yang lebih dinamis dan pekerjaan yang beragam menyebabkan masyarakat melakukan urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah kota yang begitu pesat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan, salah satu masalah yang menjadi pokok ialah masalah lingkungan. Isu lingkungan hidup tidak hanya menyangkut kepentingan lokal, regional maupun nasional saja, tetapi isu lingkungan hidup juga merupakan isu utama yang menjadi pembahasan, hal ini karena penyelamatan lingkungan hidup menjadikan kemutlakan sebagai tuntutan kelangsungan hidup manusia secara global.

Analisa tentang perkembangan jumlah penduduk tentunya berhubungan dengan peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain ialah jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi. (Depkes RI.1987 dalam Sulistyorini, 2005:77)

Permasalahan penurunan kualitas lingkungan di Indonesia yang sedang berlangsung beberapa tahun terakhir ini tidak jauh dari masalah pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan pemanasan global, terjadinya polusi atau pencemaran lingkungan umumnya dikarenakan limbah sampah rumah tangga sebagai akibatnya terjadi hal yang dapat merugikan dan terancamnya kelestarian lingkungan. Sebagai contohnya penambahan

jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain. Dengan adanya UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka perlu suatu pengelolaan sampah dengan maksimal.

Data BPS Jawa timur menunjukkan bahwa pencapaian disektor sanitasi tahun 2015 sebesar 62,14%. Sementara itu target pemerintah adalah sanitasi 100% pada tahun 2019 untuk itu pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk mencapai target sanitasi. Berdasarkan laporan dari Bappenas pencapaian tujuan SDG's di Indonesia menyatakan bahwa akses rumah tangga terhadap sanitasi layak secara nasional terus meningkat namun secara umum masih terdapat perbedaan antar Provinsi. Provinsi Jawa Timur sendiri ada di peringkat 14 dengan proporsi rumah tangga berakses sanitasi layak dasar sebesar 63,48%. Jawa Timur merupakan salah satu prosentase cukup besar dalam masalah sanitasi yang mencakup beberapa aspek antara lain penyediaan air bersih, perumahan, pembuangan kotoran, mck, limbah industri, limbah rumah tangga dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik : 2015).

Dari bebarapa permasalahan tersebut sampah rumah tangga salah satu yang perlu diperhatikan dan adanya upaya penangan lebih lanjut. Adanya permasalahan tersebut kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya Provinsi Jawa Timur membuat upaya salah satunya program tempat pengolahan sampah (TPS) 3R. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 6 daerah atau Kabupaten yang dipandang perlu untuk mengolah sampah lebih lanjut.

Tabel : 1.1

Kota/Kabupaten tergabung program TPS 3R

No.	Kota/Kabupaten yang mengikuti program TPS 3R	Tahun
1.	Nganjuk	2016
2.	Kediri	2016
3.	Tulungagung	2017
4.	Pasuruan	2017
5.	Lumajang	2017
6.	Pamekasan	2017

Sumber : wawancara dengan KSM kelurahan Karangnom

Dari data diatas 6 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki permasalahan sampah sehingga diperlukannya pengolahan sampah lebih lanjut, dari 6 Kabupaten tersebut salah satunya yang memiliki permasalahan sampah di Kabupaten Tulungagung, untuk itu dalam pengelolaan sampah di pemerintah kabupaten Tulungagung mengikuti program tempat pengolahan sampah TPS 3R. Sejalan dengan program TPS 3R tersebut terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan persampahan ialah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan sampah dengan dasar-dasar yang baik untuk kesehatan masyarakat dan pertimbangan lingkungan lainnya. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengendalikan timbunan sampah,

meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan serta mewujudkan pola hidup masyarakat berwawasan lingkungan.

Dari pernyataan diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Cipta Karya Kabupaten Tulungagung menunjuk kelurahan Karanganom karena Desa Karanganom masuk dalam kriteria pembangunan program TPS 3R dan juga membutuhkan pengelolaan sampah lebih lanjut karena penduduk di Kelurahan Karanganom masih membuang sampah di sungai, ditimbun di lahan kosong dan ada juga yang di bakar.

Adanya program tempat pengolahan sampah TPS 3R sesungguhnya dapat mendukung berbagai kebijakan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konsep pembangunan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah serta keputusan lainnya yang menyangkut kebijakan publik, dalam hal ini diperlukan pembangunan yang tepat dalam pengelolaan penanggulangan pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan serta peran aktif pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Pengembangan tempat pengelolaan sampah TPS 3R di Desa Karanganom dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan bersih sehingga diperlukan gerakan/aksi perilaku hidup bersih dan sehat secara terus menerus dan berkesinambungan. Dalam menjalankan program tersebut Kelurahan Karanganom melibatkan partisipasi dari semua komponen yang ada disektor masyarakat maupun institusi atau LSM lainnya. Dalam hal ini pemerintah belum bisa mengoptimalkan perannya tanpa adanya peran dari masyarakat sehingga pemerintah menggunakan pendekatan berbasis masyarakat.

Berbasis masyarakat merupakan upaya pemberdayaan meningkatkan kapasitas masyarakat dimana masyarakat di dorong untuk menjadi aktor utamaserta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat pemerintah desa membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dipilih secara musyawarah dan mufakat yang berperan sebagai pengurus pelaksanaan konstruksi TPS 3R, diantaranya mensosialisasikan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, memantau, mengevaluasi, mengelola kegiatan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) berbasis masyarakat di Desa Karangnom (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung). Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui program tempat pengelolaan sampah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) berbasis masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) berbasis masyarakat di Desa Karangnom oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung ?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) berbasis masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R(*Reduce, Recycle, Reuse*)berbasis masyarakat di Desa Karanganom pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan Faktor pendukung dan penghambat dalam program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R(*Reduce, Recycle, Reuse*)berbasis masyarakat di Desa Karanganom.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil yang penelitian yang akan dilaksanakan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan mempunyaimanfaat memberikan atau kontribusi terhadap ilmu administrasi , khususnya yang berkaitan dengan konsep pengembangan berbasis masyarakat.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penetian sejenis.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi pemikiran bagi pemerintah baik itu di tingkat nasional, regional, maupun lokal dalam melakukan pengembangan sanitasi lingkungan.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti ini diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mengelola lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun skripsi ini dalam lima pokok bahasan berdasarkan suatu sistematika yang seluruhnya merupakan satu kesatuan, agar memperjelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian pendahuluan yang mengantarkan pembaca untuk memahami latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memberikan pandangan dan landasan berpikir bagi pembaca melalui dua hal yaitu tinjauan empiris yang berisi penelitian terdahulu, dan tinjauan teoritis yang berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan serangkaian kegiatan penelitian, baik berupa jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah di

tetapkan sebelumnya. Dan dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta berisi saran yang dianggap perlu untuk menuju keadaan yang lebih baik dari obyek atau instansi yang di teliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan dalam Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Pasolong (2012:57) adalah suatu kerjasama atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kelompok yang berada dalam suatu negara dalam fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi publik sebagai ilmu yang mempunyai artian luas, memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya.

Menurut Nicholas Henry dalam Syamsuddin (2010:116) adalah suatu gabungan antara teori dan praktik yang kompleks dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang di perintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (dalam Tjiptoherijanto dan Manarung, 2010:112) ada tiga fungsi administrasi publik diantaranya ialah:

- 1) Formulasi atau perumusan kebijakan
Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan.
- 2) Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi
Unsur-unsur administrasi yang perlu di kelola adalah (struktur) organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut.

3) Penggunaan dinamika administrasi

Dinamika administrasi (*the dynamics of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi pengawasan, dan komunikasi.

Dari uraian beberapa pendapat ahli mengenai administrasi publik dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan dari sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan pemerintah serta untuk memenuhi peraturan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam pelayanan terhadap masyarakat.

2. Ruang Lingkup Administrasi publik

Weli dalam keban (2014:15) yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat membuat rakyat menderita jika menerapkan administrasi publik dengan gaya "Shadow Democracy" artinya hal ini menggambarkan hanya orang-orang kaya sajalah yang terus meminta seolah-olah mempunyai hak istimewa, sehingga administrasi publik bisa menyengsarakan rakyat banyak khususnya rakyat kecil. Namun berbeda dengan pendapat Cleveland dalam Keban (2004:15) yang mengemukakan bahwa peran administrasi publik sangatlah penting dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi.

Menurut Gray dalam Pasolong (2007:8) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- a) Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan,
- b) Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan serta menjamin kebebasan bagi mereka sendiri dalam bidang kesehatan, Pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia,

- c) Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari kegenerasi berikutnya serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Ruang lingkup administrasi publik yang begitu luas dan sangatlah kompleks hal ini tergantung pada perkembangan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Henry dalam Pasolong (2007:19) memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas antara lain ialah:

- a) Organisasi publik pada dasarnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku organisasi,
- b) Manajemen publik yakni berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia,
- c) Implementasi yakni menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Dalam konteks administrasi publik hal-hal yang menyangkut kerja sama yang terlibat dalam proses pembangunan suatu negara yaitu pemerintah masyarakat dan *stakeholder*. Sedangkan yang berperan penting sebagai pemegang kendali dalam administrasi pembangunan yaitu pemerintah dalam rangka menjalankan tugas kerja sama dalam pencapaian sasaran pembangunan melalui aparatur pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara administrasi publik dengan administrasi pembangunan yang menggambarkan suatu hubungan yang sempurna, dimana terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat antara administrasi publik dengan administrasi pembangunan. Administrasi publik merupakan alat utama

dalam proses administrasi pembangunan. Administrasi publik diperlukan dalam administrasi pembangunan sebagai alat untuk menyusun program-program pembangunan ke dalam suatu organisasi yang terarah.

3. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berasal dari dua kata yaitu administrasi dan pembangunan. Dari dua kata tersebut masing-masing memiliki definisi yakni administrasi yang merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan definisi pembangunan yaitu rangkaian usaha yang mencakup sistem sosial untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan secara nyata dilakukan oleh suatu negara.

Menurut Siagian (2001:5) administrasi pembangunan ialah keseluruhan usaha yang dilaksanakan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Sedangkan menurut Tjokromidjojo dalam Sudriamunawar (2012:34) administrasi pembangunan mempunyai fungsi untuk perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi dan pelaksanaannya secara efektif.

4. Paradigma Pembangunan

Pada awalnya pembangunan sering diidentikan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan dengan pembangunan, perkembangan dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Menurut Bratakusuma 2003 (dalam Pontoh dan Kustiawan, 2008:163) keempat hal tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun keseluruhan merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Paradigma pembangunan menjadi pedoman pembangunan nasional yang dapat mengalami proses demistifikasi digantikan oleh paradigma-paradigma baru yang bermunculan (Suryono, 2004:79). Adapun paradigma yang terdapat dalam pembangunan ialah:

1. Paradigma pertumbuhan
Paradigma pertumbuhan ini muncul bersama dengan teori Rostow (1960) yang mana dalam teorinya Rostow mengemukakan tentang tahapan pembangunan sebagaimana dialami dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara maju.
2. Paradigma pertumbuhan dan pemerataan
Paradigm ini dicangkan adanya pertumbuhan ekonomi di negara maju agar dapat mencapai sebesar 6% setiap tahunnya, dengan tujuan pemerataan dalam bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial maupun kelestarian lingkungan yang ditandai oleh perubahan struktur ekonomi dan sosial. Fokus dari paradigma ini adalah pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan indikator sosial.
3. Paradigma pembangunan berkelanjutan
Paradigma pembangunan berkelanjutan ini dibutuhkan oleh (1) pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada

kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, Pendidikan, dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat, (2) pembangunan yang ditunjukkan pada pembangunan sosial seperti mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya serta menciptakan kedamaian dan (3) pembangunan yang diorientasikan pada manusia untuk berbuat (manusia sebagai obyek pembangunan) melalui pembangunan yang berpusat pada manusia.

4. Paradigma pembangunan manusia

Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia ini adalah untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang bersifat global. Fokus dari paradigma pembangunan manusia ini adalah manusia dengan menggunakan indikator hubungan antara manusia dengan sumber-sumber yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Berbagai paradigma pembangunan terbentuk dan diterapkan di negara-negara di dunia, dalam perspektif negara berkembang aspek pembangunan berkelanjutan meliputi unsur ekonomi, sosial, dan ekologi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Implementasi paradigma pembangunan berkelanjutan menghendaki kondisi pemerintahan suatu negara yang terbuka dan desentralistik, hal ini sejalan dengan berlakunya era otonomi daerah di Indonesia.

B. Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu konsep pembangunan yang belakangan ini digunakan di berbagai negara sebagai acuan dalam pembangunan serta salah satu pendekatan pembangunan yang melihat masa depan sebagai perspektifnya. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) menurut Brundtland Commission dalam Junaidi (2013:25) menjelaskan definisi pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul seperti

yang dijelaskan dalam dokumen Our Common Future atau Brundtland Report yang dikeluarkan oleh *World Commission on Environment and Development (WECD)*, yaitu:

”Sustainable Development is Development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Pembangunan berkelanjutan akan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk kesejahteraannya).

Menurut Asdak (2012:40) pembangunan berkelanjutan dapat terwujud apabila terjalin keselarasan pencapaian tujuan ekonomi, tujuan sosial dan tujuan ekologi. Sebagai contoh, pencapaian pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pemerataan dan aspek daya dukung lingkungan akan menghasilkan pembangunan yang rapuh.

Sedangkan menurut Emil Salim (2009) dalam Hadi (2012:3) mempunyai definisi pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan yang diterapkan dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia yaitu : Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang, sebagai contohnya pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan dan mempertimbangkan serta melindungi daya dukung lingkungan. Dalam berbagai aktivitas yang menggunakan sumber daya alam harus diperhatikan kapasitas lingkungan alam dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Seyogyanya sumber daya alam dialokasikan untuk

beberapa zona, seperti zona industri, zona suaka alam, daerah pengaliran sungai, zona perumahan, zona perdagangan, zona taman nasional, zona perkebunan dan sebagainya. Dalam perencanaan regional harus mendasarkan zona-zona tersebut yang memasukkan muatan lingkungan didalamnya.

2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi tiga yaitu prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip keberlanjutan (Keraf,2002:175). Prinsip demokrasi menjamin agar pembangunan yang dilaksanakan yaitu sebagai bentuk perwujudan pencapaian bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama, maka pembangunan yang ada bukan semata berdasarkan kebijakan pemerintah ataupun kepentingan partai politik namun juga demi kepentingan bersama terutama rakyat. Prinsip keadilan yang pada dasarnya menjamin bahwa semua orang atau kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Dalam prinsip keadilan juga menuntut agar ada peluang yang sama bagi generasi masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proposional dari sumber daya ekonomi yang tersedia. Kemudian prinsip yang ketiga ialah prinsipberlanjutan yaitu mengharuskan kita untuk menyusun agenda pembangunan dengan perspektif capaian tujuan jangka panjang kedepannya untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam semua aspek yang ada. Prinsip ini sejalan dengan fakta bahwa sumber daya ekonomi yang ada terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup

adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, pada dasarnya prinsip keberlanjutan ini sangat menunjang prinsip keadilan antar generasi.

3. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pemanfaatan/pelestarian dan pengoptimalan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara optimal guna keselarasan keduanya dalam suatu pembangunan untuk kedepannya baik untuk masa sekarang maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat dilihat dengan pesatnya sumber daya manusia terhadap kemajuan pengguna/pemanfaatan teknologi bisa berakibat pada kurangnya kemauan manusia untuk menjaga lingkungannya, dengan berbagai dampak yang muncul seperti dampak dari efek rumah kaca, perubahan iklim, pencemaran limbah dan lain-lain. Dampak seperti yang ditimbulkan dari pemanasan global yang seperti inilah yang harus mulai kita cegah dengan mengurangi dan merawat serta memberdayakan sumber daya alam yang ada dilingkungan kita. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dilakukan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi serta kualitas lingkungan yang ada sekarang dalam mencapai stabilitas yang selaras dan seimbang secara berkelanjutan.

C. Sampah

1. Definisi sampah dan jenis sampah

Sampah merupakan suatu konsekuensi dari aktivitas manusia, meningkatnya aktifitas yang tinggi dari manusia tentunya akan berpengaruh terhadap produksi jumlah sampah. Adapun definisi dari sampah menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, dan sampah spesifik ialah sampah yang karena sifat, konsentrasi, volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Berdasarkan pendapat terkait sampah penulis menyimpulkan bahwa sampah merupakan sisa-sisa dari hasil kegiatan manusia yang masih belum memiliki nilai ekonomis dan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan tidak bermanfaat. Berdasarkan jenisnya sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik:

a. Sampah Organik

S. Alex (2012:8) mengemukakan sampah organik sebagai sisa-sisa dari pembuangan manusia seperti sisa-sisa makanan seperti sayuran, daging, buah dan lain sebagainya. Sampah organik yang telah terurai dapat dimanfaatkan untuk kompos maupun pupuk. Sedangkan menurut Suwerda (2011:12) sampah organik sebagai sampah yang dapat diuraikan secara sempurna dan mengalami pelapukan.

b. Sampah Anorganik

Suwerda (2011:11-12) memaknai sampah anorganik sebagai sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintetik dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Sampah anorganik ada yang bisa diolah untuk kerajinan sehingga menghasilkan nilai ekonomis, namun ada juga yang tidak dapat diolah sehingga tidak memiliki nilai ekonomis. Adapun jenis sampah anorganik yang dapat diolah kembali seperti plastik, kertas, kain perca, botol/kaleng dan lain sebagainya.

Bila dilihat dari sumbernya maka sampah perkotaan yang dikelola pemerintah kota di Indonesia di kategorikan menjadi beberapa menjadi beberapa kelompok yaitu rumah tangga atau pemukiman, pasar, komersial, perkantoran, hotel dan restoran, industri, penyapuan jalan dan taman (Damanhuri, 2011:13-14).

2. Pengelolaan sampah

Dengan adanya UU No. 18 /2008 tentang Pengelolaan Sampah maka perlu suatu pengelolaan sampah dengan maksimal. Adapun upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan *cara Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

1. *Reuse* (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. *Reduce* (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

3. *Recycle* (mendaurulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa pengelolaan sampah berarti setiap kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Damanhuri & Padmi (2010) dalam pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis saja tetapi juga mencakup aspek non teknis yakni seperti bagaimana mengorganisir, membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas pengelolaan sampah tersebut.

Selanjutnya, menurut pendapat Kastaman dan Kramadibrata (2007:21) pada umumnya proses pengelolaan sampah diperkotaan terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Pewadahan di tempat timbulan
2. Pengumpulan dari wadah tempat timbulan ke tempat pemindahan
3. Pemindahan dari wadahnya di alat pengangkut
4. Pengangkutan ke tempat pembuangan atau ke tempat pengolahan
5. Pengolahan sampah untuk dimanfaatkan
6. Pembuangan akhir

Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya.

3. Aspek Pengelolaan Sampah

Keberhasilan pengelolaan sebuah sarana umum seperti pengelolaan sampah bukan hanya tergantung pada aspek teknis semata tetapi juga

mencakup aspek non teknis. Berikut yang merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan sampah (Damanhuri, 2011:6-8):

1. Peraturan /Hukum dan kebijakan publik

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 menjadi payung hukum pengelolaan sampah di Indonesia. Di tingkat daerah manajemen persampahan kota membutuhkan kekuatan dan dasar hukum seperti pembentukan organisasi, pemungutan retribusi dan keterlibatan masyarakat. Peraturan yang diperlukan dalam system pengelolaan sampah perkotaan antara lain ialah yang mengatur tentang ketertiban umum penanganan sampah, rencana induk pengelolaan sampah kota, bentuk Lembaga/organisasi pengelola, tata cara pengelolaan, besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi kerjasama dengan pihak terkait baik antar daerah maupun pihak swasta. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

2. Kelembagaan dan Organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada teknik dan manajemen menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, serta memperhatikan pihak yang dilayani atau masyarakat. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi hendaknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem

operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem, lingkungan pekerjaan dan tugas yang harus ditangani.

3. Teknik operasional pengelolaan sampah

Teknik operasional dalam pengelolaan sampah perkotaan umumnya meliputi dasar-dasar perencanaan kegiatan-kegiatan yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir. Teknik operasional menjadi acuan baku bagi pengelola sampah kota dalam mengembangkan sarana dan prasarannya.

4. Finansial dan ekonomi

Komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk pengembangan. Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat termasuk di alam kegiatan rutin. Aspek pembiayaan merupakan sumber dari penggerak roda sistem pengelolaan sampah kota.

5. Sosial

Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan ialah membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program pemerintah. Hal ini antara lain menyangkut bagaimana mengubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur, faktor

sosial, struktur dan budaya setempat, kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

6. Lingkungan hidup

Persoalan yang muncul dari pengelolaan sampah yang kurang baik bukan hanya terbatas pada persoalan estetika (sampah berserakan) atau bau sampah, atau bagaimana menangani sampah agar lebih efisien dan efektif. Tetapi juga aspek dampak yang ditimbulkan seperti pencemaran atau bencana yang dapat terjadi. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai salah satu asas dasar pengelolaan sampah.

Pemerintah menyadari bahwa pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bersifat kontinyu tidak bisa dilakukan melalui paradigma lama pengelolaan sampah. Terobosan demi terobosan mutlak diperlukan agar masyarakat dapat menyadari bahwa sampah mampu menjadi sumber energi terbarukan dan disamping itu memiliki manfaat ekonomis lainnya. Konsep 3R yang ada selama ini membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dan komitmen dari berbagai pihak untuk mendukung implementasinya. Konsep 3R sejauh ini dinilai mampu mengurangi volume sampah walaupun pada akhirnya membuang sampah ke TPA masih menjadi alternatif daerah. Pelayanan publik dalam aspek apapun termasuk pengelolaan sampah membutuhkan inovasi sebagai penyesuaian terhadap semakin kompleksnya problematika yang dihadapi.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga memiliki tanggungjawab dalam mengelola sampah. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan poin d yaitu :bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Sedangkan mengenai tugas pemerintah daerah adalah sebagaimana dicantumkan pada pasal 6 tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan penanganan sampah
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat dan hasil pengolahan sampah

6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang opada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian keempat undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur wewenang pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dicantumkan pada pasal 9 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20tahun terhadap tempat pemrosesan akhir

sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup

- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
2. Penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Tidak hanya dengan masyarakat tetapi dengan daerah kabupaten atau kota lainnya pola kerjasama juga dapat diterapkan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah BabVII Kerja sama dan Kemitraan bagian kesatu kerja sama antar daerah pasal 26 sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 27

1. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha yang bersangkutan.
3. Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Program

1. Definisi program

Program merupakan unsur pertama yang ada untuk terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai, tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan dan strategi pelaksanaan.

Menurut Ashiong (2015:4-5) Program juga disebut sebagai hal yang termasuk di dalamnya serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik yang diidentifikasi,

adanya partisipasi individu atas kelompok, adanya konteks tertentu, menghasilkan *output* terdokumentasi, hasil dan dampak adanya sistem keyakinan yang terlaksana dengan program kerja dan memiliki manfaat. Kemudian definisi program yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi.

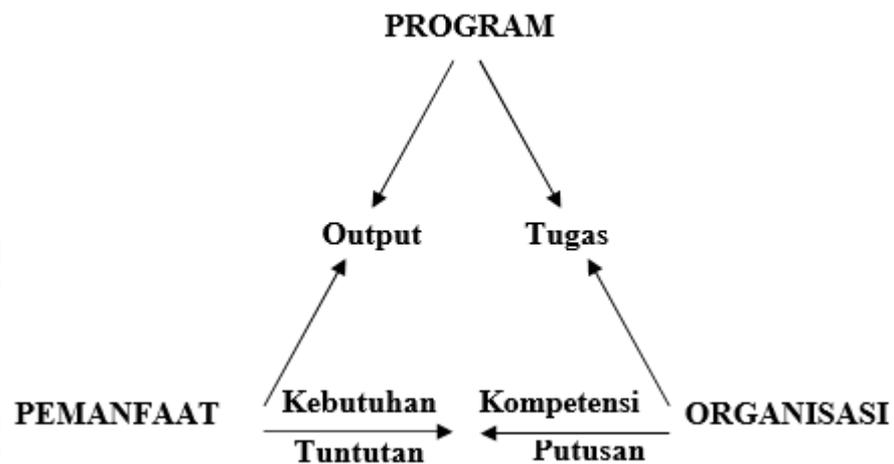
2. Implementasi Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan serta upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian
Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini menggunakan pendekatan

proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model kesesuaian implementasi program

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi. Pertama kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program

(Akib dan Tarigan, 2000:12)

Program yang di bentuk oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetapi juga di tujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya, berdasarkan pola yang dikembangkan korten dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang di syartkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat atau jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah di buat.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.Grindle (dalam Subarsono , 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi dari kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, pencapaian perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, ketepatan letak program .

3. Kebijakan publik

Pengertian Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dan/atau tentang pemerintahan, organisasi. Selain itu menunjukkan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa gagasan kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-

masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Kastasasmita (1997) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian sasaran dan tujuan dari program-program pemerintah. Pengertian dalam konteks ini merupakan upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pemerintah terhadap suatu masalah, apa yang menyebabkan atau mempengaruhi dari kebijakan tersebut. Proses dalam pengambilan kebijakan yakni perencanaan kegiatan, perumusan kebijakan, pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat dari berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik, kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

4. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program

Adapun syarat-syarat untuk dapat melaksanakan program secara



sempurna menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Wahab (2012:71-78) yaitu:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Program yang akan dilaksanakan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Sedangkan menurut James Anderson dalam Sunggono (1994:23) masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu program di sebabkan oleh:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan pemerintah
- b. Adanya kesadaran untuk menerima program pemerintah
- c. Adanya keyakinan bahwa program tersebut dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan.
- d. Sikap menerima dan melaksanakan program karena program itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu program

Faktor pendukung pelaksanaan program harus didukung dan diterima oleh masyarakat, jika anggota masyarakat mengikuti dan menaati suatu program maka suatu program akan berjalan sesuai tujuan yang telah



ditetapkan dan dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang mengakibatkan suatu program tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan suatu program sumber pembiayaan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting, Wahab (2012:91) mengatakan bahwa ada beberapa hal penting dalam melaksanakan program yakni:

- a. Struktur organisasi yang berkaitan dengan interaksi, hierarki, tujuan dan sifat-sifat.
- b. Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Sumber sarana dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.
- d. Metode kerja/prosedur kerja, yaitu berhubungan atau berkoordinasi dengan system dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerjasama secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif.
- e. Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal, dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum.
- f. Anggaran dana.

Sedangkan menurut Abdullah (1987:17) hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses program terdapat tiga unsur mutlak antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya program yang dilaksanakan jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut
- b. Target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan. Jadi dari pelaksanaan program yang telah dibuat tersebut diharuskan memberi dampak positif pada masyarakat yang menjadi target
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan

dari proses pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur tersebut.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Definisi partisipasi masyarakat

Partisipasi berasal dari Bahasa latin "*participare*" yang sama artinya dengan ikut serta, peran serta, keterlibatan atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 (pasal 2 ayat 4 huruf d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Menurut Hikmat (2006:9) partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dalam gerakan pembangunan harus selalu di dorong dan ditumbuh kembangkan secara bertahap dan keberlanjutan. Sumber partisipasi masyarakat adalah semangat solidaritas sosial yang merupakan hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan dan cita-cita bersama, dalam hal ini seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu membahu, saling

membantu mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam masyarakat.

Koentjaraningrat (1998:79) menyatakan bentuk partisipasi yang merupakan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan setidaknya terdapat dua tipe partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi dalam aktivitas bersama kelompok gotong royong dalam proyek-proyek pembangunan
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Arah dasar yang akan dikembangkan ialah proses pemberdayaan, hal ini merupakan tujuan dari pengembangan partisipasi diantaranya ialah, pertama bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat mandiri mengorganisasikan diri, dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang dapat merugikan. Yang kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, dan yang ketiga bahwa persoalam-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

2. Bentuk Partisipasi

Terdapat beberapa macam bentuk partisipasi yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1998:16) bentuk partisipasi masyarakat ialah sebagai berikut:

- a. Konsultasi dalam bentuk jasa

- b. Sumbangan spontan berupa uang atau barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga).
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas, rapat desa yang menentukan anggarannya).
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f. Aksi masa.
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri.
- h. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonomi.

Bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan prasyarat salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan di sekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan.

3. Tingkatan partisipasi masyarakat.

Dalam suatu partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat bisa mengindikasikan seberapa besar partisipasi yang ada dalam diri masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa tahapan menurut Arnstein dalam Sumartono (2004:20) dengan teori *The ladder of participation* yaitu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan aktif dengan menyampaikan langsung aspirasinya kepada pemerintah, kemudian terbentuklah suatu partisipasi yang membentuk suatu relasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat disini merasa dibutuhkan dalam suatu program pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses pencarian data secara sistematis terhadap suatu peristiwa/fenomena dengan menggunakan metode ilmiah serta berdasarkan prosedur kerja tertentu. Dalam metodologi, pencapaian kebenaran tersebut harus menggunakan pendekatan keilmuan sehingga sebagai ilmu dapat dipertanggungjawabkan (Subiyanto:1991). Jenis penelitian yang sesuai untuk di gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2012) mengemukakan beberapa jenis-jenis penelitian yang dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Pertama ialah penelitian eksplanasi yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori,
2. Kedua ialah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti;
3. Ketiga ialah penelitian eksplorasi yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social.

Menurut Sukmadinata (2006) penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang ada, baik fenomena buatan manusia maupun fenomena alamiah. Fenomena ini bisa berbentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.

Moleong (2014: 6) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan pada latarbelakang dan penggunaan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan informasi, mendiskripsikan analisis mengenai program pemerintah di Kabupaten Tulungagung mengenai program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat di Kelurahan Karanganom pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung. Upaya mewujudkan lingkungan yang bersih khususnya implementator tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tujuan terhadap permasalahan lingkungan di daerah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2012:34) mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pemilihan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) dalam berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam serta timbulnya hipotesis dalam sosial yang diteliti.

Luasnya masalah dalam suatu penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk menentukan fokus penelitian agar dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Fokus Penelitian menyatakan pokok permasalahan yang dijadikan sebagai pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah :

1. Program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) berbasis masyarakat di Desa Karangnom pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung meliputi:
 - a. Kebijakan yang mengatur program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*)
 - b. Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*)
 - c. Aktor yang terlibat

- d. Anggaran
 - e. Partisipasi masyarakat dalam Program Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*)
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) berbasis masyarakat di Desa Karanganom.
- a. Adanya kerjasama dan dukungan
 - b. Fasilitas dan anggaran

Faktor penghambat

- a. Pola pikir masyarakat (*mindset*)

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat yang akan dijadikan oleh peneliti dalam memperoleh data primer sehingga dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan situs penelitian yang akan di pilih adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung dan Desa Karanganom. Alasan dan pertimbangan dalam pemilihan lokasi dan situs penelitian ini dikarenakan gagasan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung mengenai kebersihan lingkungan terhadap sampah diperlukan pengelolaan yang tepat. Dari situs inilah peneliti

mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan program tempat pengelolaan sampah.

D. Jenis dan Sumber Data

Data atau informasi yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan yang berarti berkaitan dengan masalah atau fenomena yang dihadapi, sumber data sangat diperlukan yang digunakan penulis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi dengan cara mengamati, mencatat dan wawancara langsung. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer dan sumber data dalam penelitian ini dinamakan sebagai informasi atau melalui kunjungan langsung ke lokasi ataupun ke situs penelitian. Data primer diperoleh dari pihak-pihak narasumber yang dianggap relevan diantaranya adalah:

- a. Bapak Ari Wibowo selaku Kasi Bidang Cipta Karya
- b. Ibu Wiwik soviyah selaku Bendahara KSM
- c. Ibu Ririn Tri C selaku Sekretaris KSM
- d. Ibu Yuniati selaku Kepala Desa Kelurahan Karanganom
- e. Bapak Toto selaku masyarakat Kelurahan Karanganom

2.Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, dokumen dan sumber lainnya yang relevan sebagai data pendukung dalam penelitian:

1. Dokumen kelompok swadaya masyarakat (KSM)
2. Surat keputusan
3. Data Fasilitas dari pemerintah
4. Berita-berita tentang program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*)

Menurut Arikunto (2010:45) mengemukakan bahwa data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh. Oleh karena itu peneliti diharapkan mampu mengumpulkan data keseluruhan, baik apa saja dan siapa saja yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian hal ini peneliti membagi sumber data sebagai berikut:

1. Informasi, penelitian dalam menentukan informasi pada awalnya dengan melakukan pengamatan atau prariset terlebih dahulu. Kemudian peneliti dapat memilih informasi secara *purposive* (bertujuan). Informan dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki informasi yang menguasai

informasi serta yang bersedia juga untuk memberikan informasi bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti berperan untuk menentukan kata kunci dalam menemukan serta mengumpulkan informasi yang relevan serta melihat pemahaman informan terhadap apa yang diteliti dalam mendukung penelitian yang dilakukan.

2. Dokumen, merupakan teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh dan melalui bahan-bahan tertulis seperti peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan atau relevan dengan program tempat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lainnya.
3. Tempat dan peristiwa, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber tambahan baik melalui observasi langsung yang berkaitan dengan proses Program tempat pengelolaan sampah (TPS) 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) Berbasis Masyarakat di Desa Karanganom.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data dilapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk mengamati fenomena guna memperoleh

informasi untuk menunjang dan memperoleh data penelitian. Alat bantu yang digunakan dalam observasi berupa *laptop* yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang mungkin menunjang dalam penelitian ini, dan juga *handphone* (HP) untuk menunjang kegiatan-kegiatan observasi.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Pada proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi, yaitu pewawancara, responden, topik penelitian yang ada dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan kelompok swadaya masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian atau peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa koran, surat, gambar ataupun tulisan lain. Menurut Creswell (2012:267) kelebihan dari metode dokumentasi antara lain memungkinkan peneliti memperoleh Bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan, dapat diakses kapan saja, sumber informasi yang tidak terlalu menonjol membantu peneliti menyajikan data yang berbobot, sebagai bukti tertulis dan data ini benar-benar dapat menghemat waktu peneliti dalam mentranskrip.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2012:61) dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri baik pada *grand tour questions*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Kemudian Nasution dalam Sugiyono (2012:60-61) menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan dalam penelitian tersebut, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Menurut Sugiyono (2012:222) yang menjadi salah satu instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri yaitu instrumen utama dalam menangkap atau melihat fenomena secara langsung melalui wawancara. Menurut Moleong (2014:78) salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal tersebut dikarena dalam melakukan penelitian kualitatif, baik observasi maupun wawancara tidak boleh diwakilkan orang lain, sehingga peneliti bisa menangkap fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan serta mampu menguasai data-data yang telah diperoleh di lapangan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) instrumen ini berguna untuk mengarahkan dan membatasi peneliti dalam melakukan pencarian data yang diperlukan melalui wawancara yang akan dilaksanakan. Pedoman wawancara ini dibuat oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan wawancara agar saat melakukan wawancara dengan informan, peneliti sudah mempunyai daftar pertanyaan dan data yang diinginkan serta dapat memperdalam data informasi yang telah di dapatkan sebelumnya.
3. Catatan lapangan (*field not*), *voice recorder*, dan foto melalui *handphone* serta alat tulis. Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan catatan lapangan untuk mencatat fenomena dari obyek yang diteliti, kemudian fenomena tersebut bisa direkam menggunakan *voicerecorder*

atau difoto menggunakan *handphone* sebagai penunjang dan penguat dalam pengumpulan data informasi.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan menggunakan analisis data akan sangat memberikan pemaknaan bagi data dalam memecahkan penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Sehingga peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian data yang diperoleh tersebut dijabarkan ke dalam unit-unit dan dilakukan analisis data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar data yang diperoleh memiliki makna agar dipahami oleh pembaca. Dengan demikian analisis data model interaktif menjelaskan tentang pengangkatan dan penempatan bidang secara lebih mendalam.

Menurut model analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014) untuk menganalisis data dan hasil penelitian terdiri dari tiga tahapan dalam analisis data, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

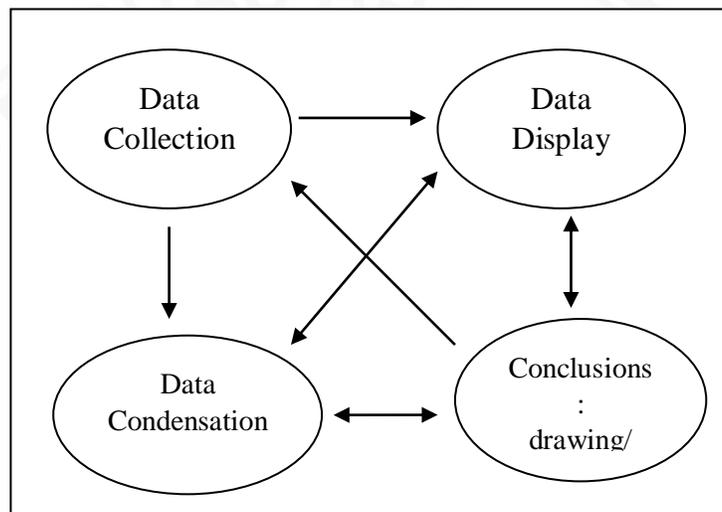
Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang di dapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Selanjutnya direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai dikondensasi. Data yang diperoleh dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (catatan wawancara), CL (catatan lapangan) dan CD (catatan dokumentasi). Data yang sudah disajikan tersebut diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/ verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah di kondensasi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulannya ialah dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Berikut ini adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014):



Gambar2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian diperlukan untuk menguji hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian, untuk melihat validitas dan reabilitas data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dipilih

karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Denzin dalam Moleong (2014) membedakan triangulasi menjadi 4 (empat) macam sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, data pengangkatan dan penempatan bidang dan sumber lain yang mendukung penelitian.
2. Triangulasi pengamat yakni adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data penelitian.
3. Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian sudah memenuhi syarat.
4. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi dari beberapa informan yang mengetahui permasalahan dalam penelitian yang dilakukan dan bersedia memberikan data program.

DaftarPustaka

- Agus, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Asdak, Chay. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta :GadjahMada University Press.
- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alikodra, Hadi S. 2012, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi, cetakan ke-1, Gadjah Mada University Press:Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik.. n.d. Geografi Indonesia. <http://www.bps.go.id>
- Creswell, J.W.2012. *Research Design* : Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed. Yogyakarta :Pustaka Belajar
- Chay, Asdak. 2012. Kajian Lingkungan Hidup Strategis :Jalan menuju pembangunan Berkelanjutan : Yogyakarta : UGM Press.
- Chandler, Ralph C.; Plano, Jack C. 1988.The Public Administration Dictionary. Santa Barbara, California: ABC-Clio.
- Damanhuri, Eriri dan Padi, Tri.2011.Buku Ajar Teknologi Pengelolaan Sampah. Bandung: penerbit ITB.
- _____ 2010. Diklat Kuliah TL 30104: Pengelolaan Sampah. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- <http://eprints.uny.ac.id/9705/2/BAB%202-08110241019.pdf>
- Hikmat, Hary, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora
- Huraerah.Abu.2008.Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan.Bandung:Humaniora

- Indradi, Syamsudin, Sjamsiar. 2010. Malang :Agritek. YPN Malang.
- Kasta Sasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan :Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta : LP3ES.
- Kastman, Roni dan Kramadibrata, Ade Moetangad.2007.Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (silasratu). Bandung: Humaniora.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2015. “Pengenalan Terhadap SNI ISO 14001 : 2015 Sistem Manajemen Lingkungan. “*Leaflet SNI ISO 14001 : 2015*.
- Keraf, A. S. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta :BukuKompas.
- Koentjaraningrat. 1998. Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia . Jakarta: Djembatan
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Miles, Hubernmandan Saldana, 2014. *Quantitative Data Analysis A Methods Souncebook Edition 3. United States of America : SAGE Publication, inc.*
- Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.....
- 2007. TeoriAdministrasiPublik. Bandung: PenerbitAlfabeta....
- Pontoh, Nia K & Kustiawan, Iwan. 2009. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: Penerbit ITB. Project for Public Spaces, Inc.2008. Streets as Places. New York Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi JawaTimur 2014-2019.
- Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan :Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta :Bumi Aksara
- 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudriamunawar. Haryono. 2012. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Edisirevisi. Bandung : CV. Mandar Maju.

- Sulistiyorini, Lilis. 2005. Pengelolaan Sampah dengan cara Menjadikannya Kompos. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.2, No 1, Juli 2005:77-84///
- Suwerda, Bambang. 2011. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta :Pustaka Rihama.
- S. Alex, 2012 sukses mengelola sampah organik menjadi pupuk organik. Yogyakarta :Pustaka Baru Press.
- Santoso, Sastropetro. 1998. *Partisipasi, Komunikasi Dan Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kenisius
- SNI 19-2454-2002. *Tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung :Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*, Malang :Universitas Negeri Malang.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tjibtoherijanto, Priono, dan Mandala Manarung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta : UI- Press.
- Tarigan, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 18. 2008. *Pengelolaan sampah*. Jakarta :Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 (pasal 2 ayat 4 huruf d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta :Graha Ilmu.